



FILOSOFI
Semeubeut
DALAM BUDAYA ACEH

PROF. DR. H. WARUL WALIDIN AK, M.A.

FILOSOFI ***SEMEUBEUT***

DALAM BUDAYA ACEH

Prof. Dr. H. Warul Walidin Ak, M.A.

AR-RANIRY PRESS

Filosofi Semeubeut dalam Budaya Aceh

Prof. Dr. H. Warul Walidin Ak, M.A.

ISBN. 978-979-3717-97-5

Cetakan pertama, 2019

viii + 176 hlm. 13,5 x 20,5 cm

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Anggota IKAPI

Anggota APPTI No. 005.080.1.02.2019

All Right Reserved © Penulis

Editor : Muliadi Kurdi

Design sampul dan Isi: Eka Saputra

Penerbit:

Ar-Raniry Press

Komplek Pascasarjana, Jln. Ar-Raniry No. 1

Darussalam-Banda Aceh

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang mereproduksi sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk dan tujuan apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Dicetak oleh:

Percetakan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry

Darussalam-Banda Aceh

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

PASAL 72

KETENTUAN PIDANA SANKSI PELANGGARAN

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu Ciptaan atau memberikan izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus juta rupiah).



Alhamdulillah. Tiada kata yang pantas terucap diawal segalanya seindah puji-pujian dan rasa syukur kepada-Mu ya Allah. Segala karunia dan limpahan rahmat karya sederhana ini dapat diselesaikan. Sanjungan salawat beriring salam senantiasa tucurahkan ke pangkuan 'alam Nabi Besar Muhammad SAW., keluarga dan para sahabat yang selalu mendampingi beliau dalam membentangkan *liwaul hamdi* demi kebahagiaan umat manusia.

Persembahan karya ini teruntuk kedua orang tua yang telah membesarkan dan mendidik penulis sejak usia kecil. Guru-guru penulis semoga rahmat dan karunia Allah selalu melimpahkan kepada mereka. Sahabat, editor, kontributor dan seluruh unsur yang terkait dalam penyelesaian buku ini penulis ucapkan terima kasih. Tanpa dukungan semua pihak penulis yakin buku ini tidak pernah sampai ke tangan pembaca. Semoga kesehatan dan kebaikan senantiasa menyertai kita sepanjang zaman.

Terakhir, setulus hati kupursembahkan karya ini untuk orang-orang yang kusayangi dan kucintai; orang yang selalu berdoa dan menyemangatiku dalam setiap derap langkah mengapai cita. Cut Megawati, SH, M.Hum isteri tercinta. Yashifa Hazqiya, Izzia An-Nabila, Ariza Dalila serta Dhiyaussyarfy Al-Hudzaqy sebagai peperusku tersayang. Semoga persembahan karya ini berguna. ❁

Prof. Dr. H. Warul Walidin Ak, MA





DAFTAR ISI

I

AWAL MULA

PENDIDIKAN DI ACEH

1

✿ Bagian Awal	1
✿ Aceh Negeri Produk Ulama	5
✿ Ulama, Dayah, Rangkang, Meunasah	9
1. Ulama	9
2. Dayah dan Rangkang	12
3. Meunasah	14
✿ Peranan Dayah, Rangkang dan Meunasah	18
✿ Signifikansi Dayah	25
✿ Ulama Simbol Kekuatan Aceh	27
✿ Ulama Dayah Pelita Umat	27

II

KONDISI SOSIAL BUDAYA

MASYARAKAT ACEH	31
✿ Bagian awal	31
✿ Kilas Balik Sejarah <i>Beut-Semeubeut</i> di Aceh	35
✿ Kegiatan <i>Semeubeut</i> di Aceh	41
✿ Kurikulum <i>Semeubeut</i> di Aceh	46
✿ Pertumbuhan <i>Semeubeut</i> Aceh	50
✿ Masyarakat <i>Learning Society</i>	56
✿ Hak Dasar Pendidikan di Aceh	68
✿ Perspektif Yuridis Hak untuk Mendapatkan Pendidikan	69

III

MAJELS PENDIDIKAN DAERAH [MPD] ACEH BENTUK PENGEMBANGAN PENDIDIKAN *MEUNASAH, DAYAH DAN BALĒ*

<i>Semeubeut</i>	79
✿ Bagian Awal	79
✿ Perpektif Historis	81
✿ Perspektif Yuridis Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan	86
✿ Mengawasi dan menilai pelaksanaan kebijakan dan program pendidikan	89

❁ Problem dan Prospek MPD dalam Peningkatan Mutu Pendidikan	94
---	----

IV

PERAN KOMITE SEKOLAH DAN DAMPAK TERHADAP PROFESIONALISME GURU 101

❁ Bagian Awal	101
❁ Perspektif Yuridis	104
❁ Pembinaan Karakter Generasi di Aceh	105
❁ Urgensi Pembangunan Karakter Bangsa Menghadapi Globalisasi	111

V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB GURU DALAM INTEGRASIAN AGAMA DAN BUDAYA 115

❁ Bagian Awal	115
❁ Integrasi Agama dan Budaya	117
❁ Kedisiplinan dan Kesejahteraan Guru	122
❁ Dampak Profesionalisme terhadap Pembelajaran	123

VI

PERANAN PENDIDIKAN DALAM

PEMBERANTASAN HIV/AIDS 131

- ✿ Bagian Awal 131
- ✿ Faham Hedonisme Faktor Pemicu
Penyimpangan Instrumen Birahi 133
- ✿ AIDS/HIV 136
- ✿ Perang Terhadap AIDS/HIV 138
- ✿ Perspektif Agama dalam Memerangi
AIDS/HIV 142
- ✿ Upaya Antisipatif dan Penanggulangan 145

VII

GENDER DAN PENDIDIKAN KELUARGA

DI ACEH 151

- ✿ Bagian Awal 151
- ✿ Gender di Aceh 159
- ✿ Pendidikan Keluarga 159
- ✿ Tanggung Jawab Orang Tua
Terhadap Anak 160

DAFTAR PUSTAKA 165

INDEKS 171



AWAL MULA PENDIDIKAN DI ACEH



✿ **Bagian Awal**

Semeubeut salah satu istilah populer dalam kegiatan pendidikan agama di Aceh. Kegiatan ini tumbuh atas dasar kesadaran masyarakat terhadap agama. Dari itu proses *semeubeut* pada masa awal tidak mesti terjadi di sebuah gedung atau fasilitas yang memadai, namun sering terjadi di rumah-rumah masyarakat, *rumoh teungku*, *rumoh geuchik*, *rumoh tuha peut* dan lainnya. Setelah lembaga ini semakin menguat, mendapat tempat dari masyarakat *semeubeut* membutuhkan pembenahan diri ke jenjang yang lebih sempurna,

misalnya membangun *meunasah*, *dayah*, *balè* dan sekolah rakyat.

Semua sarana di atas tercatat sebagai bentuk sejarah awal proses belajar mengajar dalam masyarakat Aceh. Di tempat inilah anak-anak Aceh belajar Alquran, kitab Arab-Jawi [Arab-Melayu], diperkenalkan tarikh Nabi SAW., sebagai pendidikan awal dalam membentuk akhlak, diajarkan cara membaca dan menulis Arab-Jawi. Karena itu, orang Aceh zaman dulu hampir semua mereka dipastikan mampu menulis dan membaca dalam aksara Arab-Jawi.

Kemudian yang tidak kalah penting ketika mengamati kemahiran orang Aceh dalam ilmu berhitung. Kecepatan menghitung kadang mampu mengalahkan anak-anak zaman sekarang, baik yang sedang belajar di tingkat sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas. Hampir semua keahlian itu dipastikan bekal dari jasa pendidikan semasa di *Rumoh Beut* [*rumoh semeubeut*], di *Meunasah* atau ketika belajar di *bale-balè* di Aceh. Kondisi pendidikan semacam ini terus berlanjut hingga masa kolonialis.

Era kolonialis sistem pendidikan *dayah*, *meunasah* atau *balè-balè* sedikit mendapat kendala. Kolonialis

mengkhawatirkan perkumpulan di lembaga sehingga muncul propaganda untuk membenci kolonialis. Menengahi persoalan itu, belajar di dayah, di *bale-balè* maupun berkumpul di *meunasah-meunasah* dibatasi oleh kolonialis. Sebagai solusinya, pihak kolonialis memperkenalkan pendidikan baru kepada orang Aceh, yaitu sekolah formal Hindia Belanda.

Bentuk pendidikan baru kolonialis untuk kalangan rakyat terbatas ini dikenal dengan istilah pendidikan rakyat atau rendah. Untuk kalangan terbatas Pemerintah Hindia-Belanda memberikan fasilitas kepada anak-anak bumi putra mengayomi pendidikan di lembaga ini. Artinya tidak semua kalangan mendapat hak pendidikan di lembaga ini. Selain itu, keterbatas lain yang dapat diamati pada lembaga pendidikan yang dibangun di Aceh oleh Hindia-Belanda adalah keterbatasan aspek sistem dan fasilitasnya. Hal ini tentu berbeda dengan sistem dan fasilitas yang diberikan pada sekolah di pulau Jawa, pusat kota Pemerintahan Hindia Belanda waktu itu.

Pemerintahan Hindia-Belanda memberikan beberapa tingkatan untuk jenjang pendidikan di Aceh. Misalnya, *Volkschool* dengan masa belajar

3 tahun, Vervolghschool dengan masa belajar dua atau tiga tahun, Meijesschool dengan masa belajar dua atau tiga tahun, dan De 2de Klasescholen, yaitu sekolah-sekolah kelas dua [<https://www.kompasiana.com>], akses 11 April 2019].

Sekolah Hindia-Belanda pertama diprakarsai oleh Gubernur Militer/Sipil Aceh G.C.E. van Daalen [1863-1930]. Didirikan tanggal 30 Desember 1907 di wilayah Aceh Besar distrik Ulee Lheue [<https://www.kompasiana.com>], akses 11 April 2019]. Sekolah ini mulanya diberi nama sekolah mukim dengan jumlah murid 38 orang. Selanjutnya tanggal 4 Januari 1908 dibuka sekolah serupa di desa Lam Lagang dengan jumlah murid 35 orang [<https://www.kompasiana.com>], akses 11 April 2019].

Menurut laporan umum pendidikan di Hindia Belanda tahun 1928, satu-satunya lembaga pendidikan menengah yang terdapat di Aceh dan daerah-daerah takluknya ialah yang disebut M.U.L.O [*Meer Uitbreid Lgaer Onderwijs*]. Sekolah ini merupakan lembaga pendidikan pemerintah Hindia Belanda paling tinggi yang ada di Aceh, dan didirikan pertama kali pada tahun ajaran 1920/21 di Kuta Raja dengan lama masa belajarnya 3 tahun. Berdasarkan

memori serah terima jabatan asisten residen Aceh Besar C.E. Mejern pada 17 Juni 1935, jumlah murid pada sekolah itu adalah 79 orang [<https://www.kompasiana.com>, akses 11 April 2019].

❁ **Aceh Negeri Produk Ulama**

Merujuk sejarah, Aceh tercatat sebagai wilayah pertama masuk dan berkembang Islam di Nusantara [Sunanto, 2005: 7-8] Islam masuk pertama sekali ke Aceh melalui Perlak dan Samudera Pase, dua wilayah pertama yang disepakati penulis sejarah sebagai kerajaan Islam pertama berdiri antara abad ke-7 hingga abad ke-13 M.

Sejak abad itu, ajaran Islam menjadi agama baru bagi rakyat pribumi sekaligus berfungsi sebagai agama resmi kerajaan, azas pembinaan adat budaya dan membentuk karakter masyarakat pribumi. Dengan begitu, keberadaan Islam di tengah komunitas masyarakat Perlak dan Pase [Aceh] membawa warna baru dalam sejarah perkembangan sosio-kultural masyarakat Sumatera yang waktu itu diduga kondisi sosio masyarakatnya dipengaruhi oleh paham-paham animisme.

Perlak sebagai kerajaan tidak banyak referensi sejarah yang membicarakannya. Karena itu, Perlak diduga sebagai sebuah komunitas Arab yang terdiri dari ulama. Mereka datang dan menetap di wilayah itu lalu mengajarkan Islam kepada masyarakat Perlak. Diperkirakan komunitas Islam Perlak berdiri sekitar 840-1292 M. Namun, tidak ditemukan kapan peradaban Islam Perlak berakhir. Mungkin sekali kemunduran Perlak mendapat serangan dari kerajaan Sriwijaya. Namun, ini jarang sekali diterangkan oleh para penulis sejarah. Secara logika pun kecil kemungkinan mendapat serangan dari Sriwijaya karena Perlak bukan ancaman berat bagi kerajaan besar Sriwijaya [682].

Pada dasarnya untuk memastikan tentang kerajaan Perlak sebenarnya ada beberapa sumber yang dapat dirujuk, yaitu naskah *Idhar al-Haq* karya Abu Ishak Makarani, naskah *Tadzkirah Thabat Jumu Sulthan As-Salathin* karya Syaikh Syamsul Bahri Abdullah al-Asyi, dan naskah Silsilah Raja-Raja Perlak dan Pasai karya Sayyid Abdullah ibn Sayyid Habib Saifuddin. Namun, ketiga karya ini masih dianggap sebagai kabar burung, karena hingga hari ini para pemburu karya tersebut belum dapat melacak keberadaannya.

Kerajaan Perlak mulai melemah sejak muncul kerajaan Samudera Pase. Sejak Pase berdiri pusat perhatian Islam tertuju ke Pase. Pase berdiri megah kurang lebih satu abad lamanya. Pada abad ke-14-15 kerajaan Pase dikuasa Portugis, sementara kajian Islam pindah ke pusat Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh Darussalam berdiri sekitar abad ke-15 M. Kesultanan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Syah [1496]. Di masa sultan pertama ini, kerajaan Aceh memiliki beberapa wilayah protektorat seperti Daya [Kerajaan Daya], Pedir, Pase dan Aru. Setelah beliau wafat, Aceh dipimpin oleh Sultan Salahuddin [1528-1537]. Sultan Salahudin kemudian digantikan oleh sultan Alauddin Riayat Syah, Al-Kahar [1537-1568].

Pada awal abad ke-16, Aceh mencapai puncak kegemilangan dari aspek pendidikan, dan ilmu-ilmu keislaman. Banyak ulama yang bermunculan di abad ini. Bahkan di antara ulama hidup berdampingan dengan sultan atau pernah menjadi penasehat kesultanan Aceh. Sekitar 16 hingga 17 masehi Aceh termasuk wilayah Melayu yang paling banyak memproduksi ulama. Di samping itu, menurut Lombard, sekitar abad tersebut Aceh juga memiliki sumber pendapatan terbesar Negara yang diperoleh

dari hasil bumi dan pajak. Kemajuan ini yang signifikan terjadi masa Sultan Iskandar Muda [1607-1636].

Pada abad tersebut di atas Islam terus mengalami kemajuan yang semakin mengakar dalam masyarakat Aceh. Sultan mencurahkan perhatian terhadap pendidikan agama dan kemajuan Negara. Ulama menempatkan ulama di sebelah kanannya untuk mendongkrak program tersebut. Dari itu, ulama tokoh sepanjang sejarah kerajaan sangat berperan penting dalam menghidupkan nilai-nilai keislaman. Untuk mendukung kemajuan tersebut, sultan membangun lembaga pendidikan agama di sekitar kutaraja.

Di antara lembaga pendidikan agama dimaksud diberi nama dengan dayah. Di samping berperan sebagai tempat pemersatu umat lembaga ini juga memiliki peranan dalam kaderisasi ulama sebagai generasi Aceh yang tangguh. Hal ini terbukti zaman kesultanan, Aceh mampu mengorbit para tokoh ulama menjadi seorang tokoh pendidikan, mufti dan pemimpin perang. Hingga hari ini kontribusi mereka masih dapat kita buktikan dan begitu juga jasa mereka masih dapat dinikmati oleh generasi Aceh dari masa ke masa.

❁ Ulama, Dayah, Rangkang, Meunasah

1. Ulama

Sejak Islam pertama kali menapak kaki di Aceh, seperti diterangkan sebelumnya, ulama telah berperan aktif dalam mengisi peradaban Aceh. Dalam hal ini, sebagian sejarawan menulis, semua itu tidak terlepas dari berbagai kontribusi para ulama yang datang dari berbagai wilayah di Nusantara termasuk ulama *Haramain* yang membawa warna baru dalam mengisi kapasitas intelektual masyarakat Aceh.

Aceh sangat terbuka atas kehadiran para ulama ke wilayahnya. Dengan kehadiran para ulama diharapkan dapat memberi penyuluhan agama terhadap masyarakat. Dengan kepercayaan sultan yang diberikan oleh sultan sedemikian rupa, akhirnya sebagian besar dari hasil telaahan, kajian maupun fatwa mereka yang dipakai sebagai format awal kebijakan dalam mengatur sistem kerajaan.

Tradisi ulama yang diterangkan di atas mampu bertahan sejak masa kesultanan Aceh hingga masa sebelum kedatangan penjajah dari benua Eropa. Mereka bekerja menyebarkan nilai-nilai keislaman ke Aceh, maupun ke beberapa wilayah di tanah air seperti Sumatera Barat dan pulau Jawa. Berkat kerja

keras yang diperlihatkan oleh para ulama inilah, Aceh mendapat julukan “Serambi Makkah”, wilayah pertama didatangi Islam di Nusantara. Hal ini dapat disinkronisasi dengan bukti-bukti peninggalan sejarah berupa tulisan dan manuskrip. Mungkin sekali, jika diinventarisi Aceh merupakan salah satu wilayah terbanyak meninggalkan kitab berupa manuskrip. Indikator ini menunjukkan Aceh sebagai wilayah yang terbesar memproduksi ulama zaman di Nusantara.

Merujuk istilah “ulama” adalah bentuk jamak dari *‘alim*, artinya orang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang agama. Dalam Alqurankata ulama tersebut sebanyak dua kali, yaitu pada surat al-Fathr ayat 28: “Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-Nya hanyalah ulama.” Kemudian pada surat al-Syu’ara ayat 197: “Dan tidaklah cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa para ulama Bani Israil mengetahuinya.” Pada ayat 28 surat *al-Fathr* Alquran berbicara tentang konteks fenomena alam semesta dengan segala isinya, sementara ayat 197 menerangkan pengakuan ulama Bani israil terhadap kebenaran Alquran. Berdasarkan kedua keterangan ayat ini pengertian *‘alim* atau ulama adalah orang yang memiliki pengetahuan dan wawasan terhadap

agamanya dan juga lingkungannya.

Di Aceh, ulama dipahami orang-orang 'alim dalam ilmu agama dan ilmu-ilmu kemasyarakatan. Sejak dahulu ulama berperan penting di tengah-tengah masyarakat. Mereka dipahami bukan sekedar pemimpin spiritual, tetapi mempunyai otoritas yang dianugerahi oleh pihak kesultanan dalam menjawab berbagai persoalan agama dan sosial kemasyarakatan. Karena itu ulama di Aceh zaman dulu, menjadi rujukan rakyat dalam menjawab persoalan rakyat.

Di samping berperang dalam pengembang pendidikan, menjawab persoalan umat seperti yang disebutkan di atas, ulama juga tercatat pada era perjuangan telah ikut aktif melawan kolonialis. Melihat kekuatan itu, Snouck Hurgronje, seorang *advisor* pemerintah kolonial Belanda, suatu ketika menyarankan kepada pemerintahannya, untuk menghancurkan Aceh. Namun, kalau hendak menghancurkan Aceh menurut Snouck terlebih dahulu dihancurkan adalah lembaga ulama.

Snouck berpandangan peran dan ruang gerak ulama perlu dibatasi terutama dalam aspek keagamaan dan berbagai seremonial ibadat. Mengapa Snouck berfikir seperti itu?. Setelah ia melakukan peng-

amatan dan kajian secara cermat, ternyata kekuatan Aceh ada pada ulama. Hampir semua gerakan diperankan oleh para ulama. Ulama sebagai obor inspiratif bagi berbagai gagasan ke arah perjuangan dan perubahan zaman. Dari itulah, ulama menempati posisi awal sebagai lembaga yang menginspirasi masyarakat dalam membangun Aceh, dan kehadiran institusi ini diperkirakan hampir bersamaan dengan kehadiran dayah di Aceh.

2. Dayah dan Rangkang

Kata *Dayah* berasal dari bahasa Arab, yakni *zawiyah*, artinya pojok. Istilah *zawiyah*, secara literal bermakna sudut. Orang Aceh memahami bahwa Nabi Muhammad SAW. ketika berdakwah pada masa awal Islam mengambil salah satu sudut mesjid Madinah. Akhirnya makna *zawiyah* baik secara bahasa maupun literal ini terus berkembang ke berbagai pelosok wilayah Islam. Di beberapa negara Muslim, dayah atau *zawiyah* juga lazim disebutkan sebagai sekolah agama Islam [madrasah]. Di Aceh penyebutan dayah digunakan sebagai lembaga pendidikan Islam. [<https://www.liputanaceh.com>, akses 15 April 2019].

Pada abad pertengahan, kata *zawiyah* dipahami

sebagai pusat agama dan kehidupan mistik dari penganut *tasawuf*. Karena itu, *zawiyah* dominan ditempati oleh ulama perantau. Kadang *zawiyah* dibangun menjadi sekolah agama. Pada saat tertentu *zawiyah* kadang dijadikan sebagai pondok bagi pencari kehidupan spiritual. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa penyebaran Islam di Aceh masa awal dilakukan oleh para pendakwah Arab tradisional dan sufi. Ini mengidentifikasikan dari bentuk *zawiyah* yang diperkenalkan di Aceh [Hasjmy, 1976: 104]. Selain nama yang mempunyai kesamaan makna dengan *dayah* adalah *rangkang*. Kedua istilah ini tidak asing bagi orang Aceh, misalnya dipahami jika menyebutkan seorang santri lepasan *dayah* dengan sebutan ulama *rangkang*.

Ulama *dayah* merupakan komunitas khusus di antara ulama di Aceh. Mereka mendapat nilai lebih dari masyarakat ketimbang non *dayah*. Misalnya, jebolan UIN dan lembaga pendidikan agama berbeda nilai dengan ulama *dayah*. Orang yang belajar di *dayah* berkembang asumsi dalam masyarakat mereka lebih diberakahi ilmunya ketimbang belajar di di luar *dayah*.

3. Meunasah

Secara etimologi *meunasah* diambil dari istilah bahasa Arab, yaitu *madrrasah* [lembaga pendidikan/ tempat mempelajari ilmu] [Idris, 1995: 61]. Madrasah artinya tempat belajar [Ismail, 2002: 1]. Dalam perjalanan waktu kata *madrrasah* bergeser menjadi istilah *meunasah* [Hasjmi, 1976: 104]. Secara terminologi makna ini setara dengan tempat shalat atau tempat untuk belajar ilmu keislaman tingkat dasar seperti belajar membaca Alquran bagi pemula [Hasjmi, 1976: 104].

Ismuha mengungkapkan bahwa keberadaan *meunasah* yang ada di setiap desa atau kampung di seluruh Aceh telah terjadi dalam sejarah sejak zaman kerajaan Aceh. Tempat ini telah digunakan sebagai sarana belajar ilmu agama, mengaji, sarana shalat lima waktu, tempat musyawarah, tempat penyelesaian sengketa yang terjadi di tengah masyarakat dan tempat untuk berbagai kegiatan sosial dan keagamaan lainnya [Ismuha, 1996: 7]. Jadi kalau disebut seseorang sebagai *teungku meunasah*, maka dia adalah orang yang mengajar Alquran dan sering menjadi imam shalat di *meunasah*.

Taufik Abdullah dalam Ismail Sunni, mengatakan

bahwa sebelum sebuah kampung dibangun, mereka [masyarakat Aceh] terlebih dahulu membangun *meunasah* sebagai tempat ibadah dan belajar ketimbang membangun desa [kampung]. Di samping sebagai tempat beribadah, *meunasah* juga berfungsi sebagai suatu tempat belajar tingkat dasar dalam tiap-tiap *gampong* [kampung/desa] saat itu [Hasjmi, 1976: 104].

Meunasah dalam sejarah berguna sebagai tempat *duek pakat* [musyawarah] *peutua gampong*. Mereka terdiri dari *keuchik*, sekretaris *keuchik*, *imeum meunasah* [mesjid], unsur *tuha peut*, *tuha lapan*, unsur pemuda dan lain sebagainya. Dari itu *meunasah* memiliki fungsi ganda yaitu sebagai lembaga pendidikan dan sosial kemasyarakatan. Selain sebagai tempat pertemuan anggota masyarakat, *meunasah* juga memiliki makna yang cukup strategis dalam kehidupan orang Aceh, sehingga sampai dengan saat ini tidak ada satu *gampong*-pun di Aceh yang tidak memiliki *meunasah* [Aslam Nur, 1996: 27].

Kehadiran *meunasah* di setiap *gampong* di Aceh seperti disebutkan menjadi salah satu aset penting dalam memperkuat budaya pendidikan di Nusantara. Menurut Hasjmy *meunasah* di Aceh telah

berperan aktif dalam mengisi peradaban hingga memperkenalkan Aceh ke mata dunia. Berawal dari itu terbukti bahwa zaman dahulu Aceh bisa diperhitungkan sebagai salah satu dari lima kerajaan besar dunia [Hasjmy, 1980].

Keterangan di atas menunjukkan, eksistensi *meunasah* di Aceh menjadi sangat bermakna bagi masyarakat. Dari satu sisi menjadi sarana *semeubeut* mampu memperkuat nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Berawal dari kehidupan *meunasah* ini masyarakat Aceh belajar membentuk karakter diri dalam menciptakan perubahan-perubahan [*agent of change*].

Sejarah masa lalu yang cemerlang, mendorong semua pihak untuk mengkaji tentang pemberdayaan masyarakat yang berbasis *meunasah*, terutama pasca konflik dan pasca tsunami yang membuat Aceh porak-poranda. Ketika *meunasah* menjadi pusat *semeubeut* berbasis sosial masyarakat, baik sebagai lambang persatuan dan kesatuan umat, ia akan menjadi sumber kekuatan masyarakat dalam mengatur berbagai keperluan adat maupun sebagai pusat pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan kebudayaan masyarakat *gampong*.

Beberapa literatur sejarah menunjukkan hampir semua kegiatan sosial masyarakat di *gampong* tidak terlepas dari peran *meunasah*. Di lembaga ini sebuah hukum diputuskan, dan di lembaga ini pula hukum menjadi batal. Begitu juga *peumat jaroe* sebagai tanda damai kedua pihak yang bertikai dilaksanakan di *meunasah*.

Contoh lain fungsi *meunasah* dapat dilihat sekitar tahun 60-70-an, ada sebuah tradisi adat seperti yang terdapat di desa Kuala [Lamno], Aceh Jaya dimana setiap pengantin baru yang menetap di kampung mempelai perempuan, pada malam-malam tertentu mengharuskan pengantin laki-laki keluar ke *meunasah* untuk bersilaturahmi dengan pemuda dan warga masyarakat.

Jika sang pengantin laki-laki tersebut mengingkarinya setelah beberapa kali diingatkan maka para pemuda datang menjemput paksa pengantin laki-laki tersebut dan diboyong ke *meunasah* untuk diperkenalkan kepada warga. Tradisi ini termasuk salah satu bentuk pendidikan adat di Aceh dalam upaya memfungsikan *meunasah* sebagai sarana *ukhwah* [Muliadi Kurdi: 2017]. Dari itu seperti pernah diterangkan bahwa *meunasah di Aceh* telah

berfungsi sebagai pusat kegiatan masyarakat yang tercatat sentra perubahan sosial masyarakat dalam mengisi pembangunan Nasional.

❁ **Peranan Dayah, Rangkang dan Meunasah**

Kendati *Dayah*, *rangkang* dan *meunasah* memiliki persamaan makna sebagai sarana *semeubeut* dan kegiatan sosial kemasyarakatan, namun ketiga lembaga ini punya tugas dan fungsi berbeda-beda. Ditinjau dari segi latar belakang historis, lembaga dayah telah masyhur sebelum kedatangan Islam ke Indonesia [Amiruddin, 2002: 119]. Masyarakat Jawa kuno, misalnya, telah mengenal lembaga pendidikan yang mirip dengan dayah. Lembaga ini dikenal dengan *pawiyatan*. Di lembaga ini guru [Ki ajar] hidup dan tinggal bersama dengan muridnya. Istilah ini dikenal dengan sebutan *Cantrik*. Di sinilah terjadi proses pendidikan, Ki Hajar mentransfer ilmunya kepada cantriknya.

Keterangan di atas menunjukkan bahwa kata pesantren diduga kuat berasal dari kata “santri”. Artinya, seorang yang belajar agama Islam; pesantren mempunyai arti tempat orang berkumpul untuk belajar agama Islam [Daulay, 2001:

7]. Sedangkan makna *surau* seperti di Minangkabau dimaknai bahwa institusi pendidikan penduduk asli Minangkabau yang telah terlebih dahulu ada sebelum Islam datang ke wilayah mereka.

Era Hindu–Budha di Minangkabau, *surau* mempunyai kedudukan penting dalam struktur masyarakat. Fungsinya lebih dari sekedar tempat aktifitas keagamaan. Menurut ketentuan adat, *surau* berfungsi sebagai tempat berkumpulnya para remaja, laki-laki dewasa yang belum kawin atau duda [Daulay, 2001: 7]. Dengan demikian ketiga institusi ini pada prinsipnya memiliki latar belakang historis yang berbeda, tetapi juga mempunyai fungsi yang sama.

Keberadaan lembaga *dayah* dan *meunasah* di Aceh berfungsi sebagai sarana pengembangan pendidikan di Aceh yang sangat *urgen*. Keberadaan lembaga ini dibutuhkan dalam rangka membentuk kepribadian sosial masyarakat dalam kepribadian, kecerdasan sosial, rajin dan taat dalam ibadah. Semua itu memiliki nilai filosofis yang sarat nilai, baik dari aspek agama maupun nilai sosial kemasyarakatan. Hal ini terlihat dalam sejarah kerajaan Perlak dimana sultan pertama dari kerajaan ini [840 M.] pernah meminta beberapa ulama dari Arabia, Gujarat dan

Persia untuk menghidupkan dayah, rangkang dan meunasah dengan mengajarkan agama di lembaga tersebut.

Keterangan di atas menandakan sejarah awal lahir dayah di Aceh yaitu masa kesultanan Perlak. Menurut sejarah, dayah Perlak untuk pertama sekali dipimpin oleh Teungku Muhammad Amin. Beliau dikenal dengan sebutan Teungku Chik Cot Kala. Menurut Hasjmy dayah ini termasuk lembaga pendidikan tinggi Islam yang pertama di Nusantara [Hasjmi, 1976: 104].

Pada masa kesultanan Aceh status lembaga dayah ditingkatkan. Dayah dibagi ke dalam tiga tingkatan belajar, yakni *rangkang* [junior], *balee* [senior], dan *dayah manyang* [universitas]. Sebelum diterima menjadi calon santri *dayah*, mereka terlebih dahulu dibekali dengan Alquran di *rumoh semeubeut* atau *rumoh beut* atau di *meunasah*. Di tempat ini mereka diajarkan cara-cara membaca Alquran secara benar oleh seorang *teungku semeubeut*. Dimulai memperkenalkan huruf hijaiyah; huruf alif ba dan berakhir dengan huruf ya.

Semua huruf diperkenalkan satu persatu dengan meniru ucapan *teungku*. Selain membetulkan cara

membaca Alquran, di *rumoh beut* juga diperkenalkan hukum-hukum *fardhu 'ain*, senantiasa mendampingi setiap santri supaya dapat mengerjakan shalat yang benar dan *khusyu'*. Berbeda semasa di dayah, mereka diperkenalkan cara berdebat, *meudrah*¹ dan sejumlah hafalan.

Pada kelas yang lebih tinggi, dayah menganjurkan diskusi dan debat [*meudeubat*]. Pendekatan ini sangat diminati dalam segala aktifitas proses belajar mengajar di dayah. Para *teungku* biasanya berfungsi sebagai moderator, lain kali *teungku* sebagai pengambil keputusan [Sufi, 1987: 29]

Santri dayah dikenal juga dengan sebutan *aneuk dayah*. Mereka biasanya dapat dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu santri kalong dan santri mukim/*meudagang*. Santri kalong merupakan bagian *aneuk dayah* yang tidak menetap di dayah. Setelah selesai ngaji [belajar] mereka pulang ke rumah masing-masing. Biasanya kelompok seperti ini tempat tinggal mereka di sekitar *dayah*. Sementara

1 *Meudrah* adalah suatu metode dimana murid mendatangi *teungku rangkang* dengan membawa kitab atau copy teks [*kurah*] yang dipelajarinya. Kemudian *teungku* membaca teks, memberikan komentar dan catatan dalam bacaannya tersebut. Setelah itu, meminta murid untuk membaca kembali teks tersebut di hadapan *teungku*.

santri *meudagang* [*aneuk dayah* putra/putri] mereka menetap di *dayah* dan umumnya mereka yang berasal dari daerah yang jauh dengan *dayah* [Dhofier, 1985: 52].

Dilihat dari sistem pendekatan *dayah* tradisional di Aceh umumnya bersifat monoton. Karena sebagian besar materi yang disampaikan berorientasi kepada sistem kurikulum lama. Artinya pola pengajaran kitab-kitab klasik abad pertengahan. Mungkin sekali, kondisi ini lebih disebabkan oleh pengaruh tradisi klasik yang begitu kuat sehingga terkesan para tokoh *dayah* tidak ada berani berpindah ke tradisi lain seperti menyusun kurikulum baru atau memasukkan beberapa materi umum ke dalam kurikulum *dayah* dan lain sebagainya.

Pada dasarnya, sistem pengajaran yang berkembang pada *dayah-dayah* di Aceh sama ada dengan yang di pesantren-pesantren pulau Jawa atau *surau-surau* di Sumatera Barat. Untuk membuktikan persamaan kurikulum antara *dayah* di Aceh dan pesantren di pulau Jawa dijelaskan sebagai berikut:

- ✦ Ditinjau dari segi materi pelajarannya, yang diajarkan adalah mata pelajaran agama semata-

mata bertitik tolak pada kitab-kitab klasik (kitab kuning). Umumnya, pelajaran dimulai dengan kitab-kitab sederhana (*kitab jawoe/ kitab Arab Melayu*) kemudian dilanjutkan dengan kitab-kitab yang lebih mendalam materinya, tingkatan suatu *dayah* dapat diketahui dari jenis kitab-kitab yang diajarkan [Hasbullah, 1999: 144].

Setidaknya ada delapan macam bidang pengetahuan dalam kitab-kitab Islam klasik yang diajarkan di *dayah*, yakni 1) *nahwu* dan *saraf* [morfologi], 2) fiqh, 3) Ushul fiqh, 4) Hadits, 5) Tafsir, 6) Tauhid, 7) tasawuf dan etika, dan 8) cabang-cabang lain seperti *tarikh* dan *balaghah* [Dhofier, 1985: 51]. Tinggi rendahnya ilmu seseorang diukur dari kitab yang dipelajarinya;

- ✧ Ditinjau dari segi metodenya adalah hafalan, *meudrah* dan *muedeubat*. Dalam tradisi pesantren di Jawa sering disebut *sorogan* dan *wetonan*;
- ✧ Ditinjau dari segi sistem pembelajaran adalah non-klasikal. Yakni santri (*aneuk dayah*) tidak dibagi berdasarkan tingkatan kelas, tetapi berdasarkan kitab yang dipelajarinya; dan

✎ Ditinjau dari segi manajemen pendidikan, maka di lembaga pendidikan ini tidak mengenal nomor induk pelajar, ada rapor, ada sertifikat dan lain sebagainya [Dhofier, 1985: 52].

Orang Aceh memahami kalau pergi *meudagang* indentik dengan pergi belajar di *dayah-dayah*. *Meudagang* biasanya membutuhkan waktu tanpa batas. Artinya seorang murid datang dan pergi meninggalkan *dayah* kapan ia suka. Karena itu, ada santri yang belajar di beberapa *dayah*, tidak hanya di Aceh bahkan ke beberapa wilayah di Nusantara. Mereka butuh penyegaran dengan cara hidup dan belajar berpindah-pindah.

Demikian juga dengan masa belajar yang dibutuhkan oleh seorang santri *dayah*, umumnya sangat tergantung kesanggupan biaya atau setelah diberikan ijazah oleh guru [*teungku chik*]. Pengakuan dari *teungku chik* sebagai pimpinan *dayah*, melegalkan seorang santri terjun ke masyarakat atau bekerja sebagai *teungku*² *semeubeut* di *meunasah-meunasah*, menjadi *da'i* atau imam-imam mesjid di Aceh.

2 Menjadi guru di *meunasah* atau sebagai imam shalat sejak zaman di Aceh adalah pekerjaan ikhlas, tanpa dibayar. Setiap mereka bekerkapa pada profesi masing-masing. Misalnya, sebagai buruh kasar; petani, pekerja bangunan, tukang kayu, dsb.

❁ Signifikansi Dayah

Realitas sejarah mengungkapkan bahwa lembaga *dayah* mempunyai empat kegunaan yang sangat signifikan bagi masyarakat Aceh, yaitu sebagai pusat belajar agama (*the central of religious learning*), sebagai benteng terhadap kekuatan melawan penetrasi penjajah, sebagai agen pembangunan, dan sebagai sekolah bagi masyarakat [Hasjmi, 1976: 104].

Pada abad ke-17 M., Aceh menjadi pusat kegiatan intelektual. Para sarjana datang dari belahan dunia balajar ke Aceh. Seorang ulama terkenal Syeikh Muhammad Yusuf al-Makkasari [1626–1699 M.], salah seorang ulama tersohor pada masanya pernah belajar di Aceh. Beliau seorang ulama tarekat *al-Qadiriyyah*. Selain Syeikh Yusuf terdapat juga nama Syeikh Burhanuddin dari Minangkabau. Beliau ulama terkenal berasal dari Ulakan [Minangkabau] juga pernah belajar kepada syeikh Abdul Ra’uf as-Singkily di Aceh.

Atensi ulama *dayah* terhadap ilmu agama tidaklah pernah sepi, walau kondisi ekonomi dan politik era kesultanan Aceh pernah mengalami pasang surut. Mereka senantiasa menjalankan tugas kedayahan, mengajar, berdakwah dan melahirkan karya. Dalam

sejarah diterangkan setidaknya 13 ulama dayah sangat produktif melahirkan karya. Data lain menyebutkan karya yang ditulis oleh ulama dayah berjumlah 114 kitab [Abu Bakar dan Wamad Abdullah, No. 2: 35]. Karya-karya tersebut terdiri dari berbagai subjek kajian. Misalnya tentang tauhid, akhlak, ilmu tasawuf, logika, filsafat, fiqh, hadits, tafsir, sejarah, astronomi, obat-obatan, dan masalah lingkungan.

Al-Attas berpendapat bahwa selain menulis karya dalam bahasa Melayu dan bahasa Arab seperti diterangkan, ulama dayah di Aceh juga aktif mengembangkan sastra Melayu. Hal ini dapat dibuktikan melalui syair-syair yang terekam dalam karya Hamzah al-Fansury [1510-1580 M.]. Al-Fansury merupakan seorang pioner dalam perkembangan sastra Melayu di Nusantara. Dia pioner sastra Melayu, karena dianggap paling berjasa dalam merumuskan secara rasional dan sistematis karya sastra melalui pendekatan filsafat [Al-Attas, 1990: 68]. Tidak terkira sejumlah karya besar al-Fansury menulis tentang Aceh. Ini sebagai pertanda bahwa wilayah Aceh masyhur dengan nilai-nilai keulamaannya.

❁ **Ulama Simbol Kekuatan Aceh**

Ketika perang melawan kolonial Belanda pecah, ulama dayah mempunyai peran penting. Rakyat di bawah komando ulama membuat perlawanan terhadap kebijakan Belanda. Ketika para *Sultan* dan kaum *uleebalang* [kaum ninggrat] tidak sanggup lagi menjalankan roda pemerintahannya, para tentara menginginkan hadir pemimpin lain untuk melanjutkan perlawanan untuk membela tanah air.

Masa itu ulama dayah tampil di barisan depan membuat perlawanan terhadap Belanda. Misalnya Tgk. Abdul Wahab Tanoh Abee, Tgk. Chik Kuta Karang dan Tgk. Muhammad Saman [dikenal dengan Tgk. Chik di Tiro]. Dengan demikian, kontribusi ulama dayah sejak masa itu patut menjadi contoh bagi generasi Aceh bahwa ulama dayah tidak hanya mahir dalam mengajar teori atau mengajarkan teori kitab kuning, tetapi juga mampu menjadi komando perang.

❁ **Ulama Dayah Pelita Umat**

Sebelum Belanda menapak kaki di Aceh, beberapa ulama dayah tercatat aktif dalam mengembangkan

ekonomi kerakyatan. Misalnya dalam bidang pertanian muncul Tgk. Chik di Pasi. Beliau memimpin masyarakat membangun irigasi seperti yang pernah dilakukan oleh Tgk. Chik di Bambi dan Tgk. Chik di Rebee sebelumnya [Baihaqi A.K, 1983: 117]

Alumni *dayah* seperti diterangkan telah memberi pengaruh besar terhadap kehidupan sosial keagamaan bagi masyarakat Aceh. Berdasarkan kenyataan ini para ulama *dayah* telah memainkan peran penting dalam mengisi pembangunan bangsa. Hal ini tidak terlepas dari pengalaman hidup semasa di *dayah*. *Dayah* telah membentuk karakter *aneuk dayah*; kuat dalam aspek mentalitas maupun spritualitasnya.

Pengalaman di atas membuat *aneuk dayah* memiliki karakter yang berbeda dalam aspek kultural. Di satu sisi mereka dididik oleh realitas sosial semasa di *dayah*; mereka terbiasa hidup dalam keberagaman dan beradaptasi dengan masyarakat desa yang mereka tempati. Kelak pengalaman ini tentu sangat bermanfaat bagi seorang santri *dayah* ketika terjun ke dalam masyarakat. Dari pengalaman ini, *aneuk dayah* [santri *dayah*] menemukan konsep keseimbangan dalam menghadapi tantangan global.

Belajar di *dayah* tidak mesti harus banyak modal.

Karena itu, pemilihan dayah untuk melanjutkan pendidikan anak bagi orang Aceh menjadi alternatif, terlebih lagi yang ekonominya lemah, akan kualahan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Di dayah mereka tidak dibebani bayaran biaya pendidikan, bahkan ada beberapa dayah yang menanggung makan untuk murid fakir atau miskin. Makanan tersebut biasanya didapatkan dari *teungku* [pimpinan dayah] atau sumbangan masyarakat secara suka rela.

Ciri lain terlihat perbedaan antara dayah dan sekolah umum bahwa sekolah umum mewajibkan murid-muridnya membayar biaya pendidikan dan mewajibkan murid memakai pakaian seragam. Kondisi ini tentu memberatkan murid untuk melanjutkan pendidikan terutama dari kaum fakir atau miskin. Dari banyak tuntutan itulah menjadi alasan bagi masyarakat untuk memilih dayah sebagai alternatif.

Selain alasan di atas, pemilihan dayah dinilai sangat komprehensif ketimbang belajar di luar dayah. Karena belajar di dayah tidak hanya menawarkan materi agama, tetapi juga memberi bimbingan spiritual dan latihan fisik. Seorang guru atau *teungku*

di dayah tidak hanya bertanggung jawab dalam hal mengajar, namun berfungsi sebagai pelita, penasehat, pembimbing, pelatih dan penolong. Hubungan antara murid dan guru secara personal terlihat lebih akrab.[]



KONDISI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT ACEH



❖ **Bagian awal**

Aceh salah satu provinsi di Indonesia yang masyhur dengan sejarah peradaban Islam dan kekayaan budaya. Kekayaan itu, membuat wilayah ini dihormati oleh bangsa luar. Salah satu bukti peradaban Islam dengan dikembalikannya hak istimewa dan otonomi khusus untuk menjalankan Syariat Islam secara *kaffah* [sempurna] untuk wilayah ini.³

Dari aspek budaya masyarakat Aceh terlihat gigih

³ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, BAB I (Ketentuan Umum), Pasal 1, Ayat 1, Hlm. 2.

dalam melaksanakan rangkaian adat-istiadatnya. Semua itu tentu tidak terlepas dari sejarah awal islamisasi ke Aceh. Pendekatan ini membuat sistem agama yang dipahami oleh masyarakat Aceh terintegrasi dengan nilai istiadatnya [Tim Peneliti, 2012: 109-110]. Karena itu, keislaman di Aceh dapat hidup damai dengan nilai-nilai adat-istiadat, termasuk integrasi dalam masalah pendidikan agama semisal *semeubeut*.

Di antara adat *semeubeut* yang masih berlaku dalam masyarakat Aceh adalah adat *antat beut* [mengantar anak ke tempat pengajian pada hari atau malam pertama belajar agama] atau mulai *beut* dengan *peusijuek* [Muliadi Kurdi: 2017]. Setiap anak yang diantar ke *rumoh beut* ditepung tawari [*peusijuek*] sebelum diserahkan kepada *teungku semeubeut*. Di hadapan *teungku* orang tua/wali menyerahkan anaknya disertai dengan ucapan, “*nyóe aneuk, kamóe seurahkan sepeunoh hatèe bak jaróe teungku tuk neu didik ilemèe agama, jeut beuguna, dituri Allah, Nabi, urueng chik dan gurèe, meuyóe pih anèuk kamóe nyóe batat atawa tungàng han dipateuh peu yeng teungku pegah adak neupóh matèe pih jeut bak kamoe.*” [Muliadi Kurdi: 2017].

Bungòng jaròe [bawaan] orang tua/wali tatkala mengantar anak ke *teungku semeubeut* biasanya disesuaikan dengan kemampuan. Ada orang tua yang membawa nasi ketan kuning, tepung tawar, kopi dan makanan lainnya. Ada juga yang ekonominya kurang ketika menyerahkan anaknya ke *teungku* hanya dengan sesisir pisang atau pisang ambon, kadang satu bambo beras, dan lain sebagainya.

Demikian juga prinsip yang ditanamkan oleh orang tua kepada anaknya sebelum diserahkan ke *teungku semeubeut*. Orang tua menasehati anak dengan kata-kata, “*meuyóe pih geu dhót [geubeugèuh] atawa geucarót-marót lè gurèe [teungku] beugèut that tasaba. Meunan cit, meuyóena pihna keunóng siram ngèun iè kerna teulat seumbahyang subóh misèu jih atawa keunèung poh ngèn awèe kerna batat atawa tungàng bèk keuh na beungèuh hatèe, deundam atawa nièt tabalah, kerna saba atèuh beungèuh teungku keu geutanyóe jalan meuteumeung ileumèe, menancit watèe geupóh geutayóe ngeun awèe, nyan tanda gaseh teungku keugeutayóe, uróe dudóe [akhirat] yeng beukah geupòh atawa meucurèh di tubóh geutayóe lè teungku nyan harèum dipajóh lè apui nuraka.*” [Muliadi Kurdi: 2017].

Demikian kurang lebih nasehat yang lazim

disampaikan oleh orang tua/wali di Aceh ketika hendak menyerahkan anaknya ke *teungku seumeubet* [ustaz]. Substansi dari nasehat orang Aceh ini kiranya merujuk kepada pesan Imam Asy-Syafi'i.

إصْبِرْ عَلَىٰ مُرِّ الْجَفَا مِنْ مُعَلِّمٍ
فَإِنَّ رُسُوبَ الْعِلْمِ فِي نَفَرَاتِهِ

*Bersabarlah atas pahitnya perangai kasar gurumu
Karena ilmu itu gagal ketika menjauh darinya
[Diwan Imam Asy-Syafi'i, edisi bahasa Indonesia]*

Tradisi di atas sepanjang zaman menjadikan salah satu adat yang melekat dalam masyarakat Aceh. Jika adat istiadat ini terabaikan boleh jadi suatu pekerjaan dianggap kurang barakah. Perilaku ini sepertinya berprinsip pada *qawaid fiqhiyyah*; sebuah kaidah yang disepakati oleh ulama tentang posisi 'urf. Mayoritas ulama, terutama kalangan *syafi'iyah* menyatakan, 'urf di suatu daerah sama dengan posisi syara'. Karena itu, 'uruf dianggap sah apabila menetapkan hukum dengannya [Al-Sayuthi, t.t.: 70]

Keberagaman adat istiadat dalam masyarakat Aceh seperti diterangkan memperoleh legitimasi

dari nas. Artinya, apabila ada adat yang tidak sesuai dengan nas maka adat tersebut bertentangan dan wajib dibuang. Adat yang mendapat legitimasi nas dimaksud adalah adat-adat yang bersandar kepada mazhab Asy-Syafi'i, terutama dalam kaitan dengan urusan furu'iyah. Sementara dalam masalah kalam orang Aceh sama tetapi merujuk kepada al-Ghazali [Asya'irah].

Untuk memperkuat makna adat Aceh yang telah mendapat legitimasi hukum berdasarkan mazhab Asy-Syafi'i, kalam Asya'irah seperti diterangkan di atas, oleh pihak kesultanan Aceh Darussalam dimasukkannya ke dalam Kanun Meukuta Alam [Hasymy, 1993: 249]. Berdasarkan keterangan ini bahwa materi *beut-semebeut* yang diperkenalkan dalam pengajaran agama di Aceh sangat terikat dengan pemikiran mazhab Asy-Syafi'i, kalam al-Ghazali [Asya'irah] [Zukhdi, 2017: 121-149].

❁ **Kilas Balik Sejarah *Beut-Semebeut* di Aceh**

Di era kesultanan, Aceh memiliki lembaga pendidikan dengan tingkatan yang berbeda. Misalnya, *rumoh beut*, *meunasah*, masjid, *dayah* dan *ranggang*.

Bagi anak-anak Aceh, seperti pernah diterangkan, pada masa awal belajar agama kepada orang tuanya di rumah. Hal ini menjadi tradisi orang Aceh dimana mereka mengajarkan ilmu agama kepada anaknya sebelum melanjutkan pendidikan ke jenjang dayah. Bagi orang tua yang tidak mampu mengajari anaknya Alquran atau ilmu agama maka anaknya diserahkan kepada *rumoh beut* [Amiruddin: 2018]. *Rumòh beut* di desa dapat disetarakan dengan sekolah dasar [SD] dalam institusi pendidikan umum.

Setelah selesai belajar agama tingkat dasar, biasanya anak-anak diantar oleh orang tuanya kepada jenjang selanjutnya, yaitu *Meunasah*. Tingkat pendidikan *meunasah* di zaman sekarang dapat disetarakan dengan Sekolah Menengah Pertama [SMP]. Dalam sejarah Aceh, setiap *gampòng* ada satu *meunasah* sebagai pusat kegiatan *gampòng* dan pusat pendidikan *aneuk gampòng*.

Meunasah selain sebagai tempat musyawarah [rapat] juga dipakai sebagai lembaga pendidikan agama tingkat kedua. Materi yang diajarkan di lembaga ini adalah menulis dan membaca huruf hijaiyah, membaca Alquran, cara beribadah, akhlak mulia, rukun Islam, rukun iman, dan lain sebagainya.

Pembelajaran berlangsung setelah shalat magrib hingga setelah shalat 'isya, kecuali malam jum'at maka malam libur *beut* [Ibrahim, 2014: 25].

Pendidikan agama *aneuk gampòng* di Aceh setelah belajar di tingkat *meunasah* adalah di lembaga mesjid. Dalam *Qanun Meukuta Alam*, bahwa dalam tiap-tiap mukim harus didirikan satu mesjid. Mesjid sebagai pusat segala kegiatan umat, juga merupakan pusat pendidikan Islam dalam sebuah mukim. Dengan demikian, masjid tingkat menengah pertama juga digunakan sebagai lembaga *semeubeut* bagi *aneuk gampòng* di Aceh.

Sejak dulu, masjid di Aceh digunakan untuk lembaga *semeubeut*. Para murid mendatangi masjid untuk mendalami ilmu agama. Bagi murid pendaang, supaya dapat belajar dengan baik mendirikan bilik-bilik di sekitar masjid. Bilik-bilik yang dibangun dikenal dengan rangkang berukuran 2 X 8 m. Bilik-bilik yang dibuat sangat bervariasi, seperti jambo kaki empat, disekat-sekat, terbuat dari bambu yang beratapkan rumbiya. Karena itulah lembaga *semeubeut* di tingkat menengah pertama ini dinamakan *rangkang* [bale] yang terletak dalam kompleks masjid, dan yang menjadi guru pada

tingkatan ini adalah *teungku gampông* atau *teungku rangkang*.

Ada *teungku gampông* yang dijumpai dalam masyarakat Aceh, namanya dinisbahkan kepada sebuah desa atau wilayah. Misalnya, Abu Calang karena beliau menetap di Calang, Abu Ibrahim Wayla karena asal beliau dari Wayla, Abu Ibrahim Lamno karena beliau berasal dari Lamno, Abu Krueng Kalee kerana beliau menetap di desa Krueng Kalee, *teungku paloh* karena beliau berasal dari desa Paloh, Teungku Meulaboh karena berasal dari daerah Meulaboh, Teungku Chik Pante Geulima, Ismail Hasan Meutarem karena berasal dari desa Meutarem dan lain sebagainya. Adapun materi *semeubeut* yang diperkenalkan di lembaga mesjid adalah fiqih, ibadah, tasawuf, tarikh Islam, bahasa Arab [kitab kuning], bahkan termasuk pelajaran Arab-Jawi [Melayu]. Jenjang pendidikan lembaga mesjid ini bila dibandingkan dengan pendidikan sekarang dapat disamakan dengan SMA.

Para ulama pada tingkatan ini menerangkan materi pelajaran yang dianggap *fardhu 'in* seperti ilmu fikih, ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Sementara kitab yang digunakan dalam hubungan dengan ilmu

ini adalah *Ta'lim al-Muta'allim*. Adapun selebihnya, para *teungku* pada tingkatan ini memperkenalkan kepada santri hukum yang berkaitan dengan kifayah. Demikian gambaran *semeubeut* dalam masyarakat Aceh dan tradisi ini pada dasarnya telah tercantum dalam Kanun Meukuta Alam [Daud, 2018].

Selain di atas, Aceh terdapat juga model lembaga *semeubeut* yang dikenal dengan dayah. Lembaga ini jika disetarakan dengan zaman sekarang setingkat dengan Universitas [Zukhdi, 2017: 131]. Di lembaga dayah, murid dididik untuk menjadi ulama pewaris Nabi SAW. Mereka dibentuk karakter kuat dalam memahami agama dan sosial. Bagi santri menempuh pendidikan di dayah tentu setelah selesai masa belajar agama di lembaga mesjid.

Di dayah mereka mendalami berbagai mata pelajaran agama dan umum sama halnya di perguruan tinggi. Karena itu, tidak heran banyak ulama dayah di masa lalu ahli dalam ilmu pertanian, ilmu falak, ilmu bela diri, ilmu perang dan persenjataan [Mastuhu, 1994: 39]. Hal ini dapat dibuktikan dengan kehadiran dayah Cot Kala [abad 10 M] seperti pernah diterangkan. Dayah ini termasuk yang pertama muncul di Asia Tenggara dan Nusantara. Kemudian

berkembang Dayah Mayang Baiturrahman [abad 16-18 M.]. Dayah ini diperkirakan tumbuh dan berkembang masa keemasan Aceh Darussalam [Zukhdi, 2017]

Pada masa perang Aceh melawan kolonialis Belanda tidak terhitung jumlahnya ulama gugur sebagai syuhada. Saat itu kegaitan *beut-semeubeut* di Aceh sempat terhenti sejenak. Belanda menggantikan sistem dayah dengan sistem pendidikan berbasis kolonialis. Kemudian zaman Jepang memperkenalkan sistem pendidikan yang disesuaikan dengan budaya Jepang.

Di atas sistem yang ditinggalkan Belanda dan Jepang ini, pada masa kemerdekaan Indonesia mulai membangun sistem pendidikan baru yang bersifat Nasional. Inilah rentetan sejarah yang mempengaruhi pendidikan di Aceh. Di atas segalanya, sistem *beut-semeubeut* yang ada tetap bertahan dan juga beradaptasi dengan sistem yang baru [Hadi, t.t.:185].

Tradisi *semeubeut* pasca kemerdekaan berkembang dan kembali digemari oleh masyarakat Aceh. Indikator ini dapat diamati hingga hari ini dimana sebagian besar *meunasah*, *balee*, *masjid*, *ranggang* dan dayah di Aceh masih aktif menjalankan tradisi

semeubeut. Karena itu, *semeubeut* dikelompokkan ke dalam 4 [empat] fase. *Pertama*, *semeubeut* [abad 10 M.] yaitu fase awal Islam di Aceh. *Kedua*, masa keemasan *semeubeut* [abad 16-18 M.]. *Ketiga*, masa kemunduran *semeubeut* yaitu masa penjajahan Belanda [abad 19 M. dan abad 20 M.]. *Keempat*, masa kebangkitan kembali *semeubeut*.

❁ **Kegiatan *Semeubeut* di Aceh**

Kegiatan *semeubeut* dalam masyarakat Aceh dikenal dengan istilah *beut-semeubeut*. *Beut-semeubeut* bila diistilahkan dalam bahasa Indonesia mempunyai makna kegiatan belajar mengajar. Akan tetapi, maksud dari *beut-semeubeut* dalam istilah Aceh adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik pada suatu lingkungan.

Tradisi *beut-semeubeut* masyarakat Aceh pada tingkat dasar sering terjadi di rumah *teungku*. Biasanya berlangsung pada malam hari setelah magrib. Pada tingkat ini anak-anak diajari ilmu tajwid, cara membaca Alquran secara benar, dasar-dasar aqidah, ibadah, tarikh nabi dan muamalah. Pelajaran pertama diajarkan adalah pengenalan terhadap huruf-huruf Arab. Ini sebagai pengantar untuk bisa

membaca Alquran dan kitab. Selain itu, pengenalan awal diajarkan oleh *teungku* kepada murid tingkat dasar adalah mengenalkan huruf-huruf Hijaiyah secara fasih dan benar. Biasanya pada tingkatan ini, kitab yang dijadikan pegangan adalah Alquran cut [Quran Kecil/Kitab Aléh Ba].

Anka-anak diminta untuk mengenal dan menghafal huruf-huruf Hijaiyah. Setelah mampu mengenal dan menghafal semua huruf tersebut dimulailah mengajarkan cara membaca Alquran dengan mengikuti bacaan *teungku*. Setelah murid dianggap mahir dalam bacaan Alquran barulah diajarkan kefasihan hingga dapat membacanya dengan sempurna.

Setelah si anak berhasil mengaji pada *Alquran Ubiet* baru kemudian dilanjutkan dengan pengajian *Alquran Rayeuk* [Quran Besar]. Selain itu, juga diajarkan beberapa Kitab Jawoe [kitab yang menggunakan aksara Arab-Melayu] yang isinya adalah pengetahuan dasar tentang agama Islam. Kitab yang digunakan biasanya adalah *Masailal Muhtadi*, *Bidayah* dan *Kitab Lapan* [Mannan, 2007: 113-114].

Setelah selesai pendidikan tingkat dasar bersama orang tua maupun di *Rumoh beut* bersama

teungku, anak biasanya diantarkan ke *meunasah*. Di *meunasah* murid diajarkan menulis dan membaca huruf hijaiyah, membaca Alquran, cara beribadah, akhlak, rukun Islam, rukun iman, dan sebagainya. Pembelajaran berlangsung pada malam tertentu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Di *meunasah* para murid diajarkan ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu tarikh dan ilmu tajwid seperti pernah diterangkan. Materi yang diajarkan di *meunasah* adalah materi tingkat menengah pertama, dan materi ini dianggap belum cukup untuk ukuran belajar *faridhu 'in*. Pendekatan *semeubeut* di *meunasah* adalah *talaqqi* atau *syafahhi*.

Pendekatan seperti ini adalah tradisi yang dilakukan dari generasi ke generasi [sebelumnya [Abdul Hadi, t.t.: 190]. Ditinjau dari sisi pendekatan, *talaqqi* atau *syafahhi* termasuk model pembelajaran Islam, dan pendekatan ini pernah dipilih oleh ulama *salaf al-salih* dalam mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat sejak zaman lampau.

Setelah selesai pendidikan di *meunasah*, anak orang Aceh diantarkan ke lembaga masjid. Masjid merupakan jenjang pendidikan di atas tingkatan *meunasah*. Karena itu, sejak zaman kesultanan

Aceh, mesjid pernah dipakai sebagai tempat belajar-mengajar bahkan ada sebagai murid yang bertempat tinggal jauh dengan tempat pengajaran masjid mendidikan bilik atau memondok di masjid. Karena itulah tingk *semeubeut* di masjid sering juga dinamakan *rangkang* [bale]. Adapun materi yang diajarkan di bale adalah fiqih, ibadah, tasawuf, tarikh Islam, bahasa Arab [kitab kuning], bahkan termasuk pelajaran yang berbahasa Arab Melayu [Muhsinah Ibrahim, 2014: 24-25]

Pada dasarnya, materi pelajaran yang diajarkan di mesjid punya kesamaan dengan materi yang diajarkan di *meunasah*. Hanya saja di mesjid tidak lagi menggunakan kitab Jawi, tetapi kitab Arab gundul [kitab kuning]. Karena itu, berarti di mesjid sudah ada pelajaran ilmu bahasa Arab semisal Nahwu dan Saraf sebagai sarana penting untuk memahami kitab kuning. Tentunya metode pembelajaran pun metode *talaqqi* atau *syafahhi*.

Dalam membuktikan pendekatan *talaqqi* atau *syafahhi* yang digunakan pada lembaga *semeubeut* dapat diamati kegiatan ini pada kehidupan sosial keagamaan orang Aceh. Karena hampir semua pendekatan *semeubeut* di Aceh menggunakan metode

talaqqi atau *syafahhi* walaupun telah hadir metode pembelajaran nasional yang modrn.

Adapun tradisi *semeubeut* di dayah secara teknis dapat dijelaskan bahwa para santri duduk dengan cara *halaqah* [melingkari], yaitu duduk dengan bersila dan melingkar. Ada ada di antara mereka yang duduk dengan liter U. Sementara guru mengambil posisi di tengah. Duduk seperti ini merupakan tradisi yang terus diwariskan dari dulu hingga hari ini. Kondisi seperti ini melahirkan keakraban dan tumbuhnya sifat *takzhim* terhadap guru.

Pada tingkatan ini tetap saja menggunakan pendekatan *halaqah* [*talaqqi/syafahhi*]. Namun ketika telah menjadi dewan guru tradisi *semeubeut* berubah dengan metode *muzakarah*, *mubahasah* dan *mujadalah*. Pada tingkatan ini proses *beut-semeubeut* dilakukan dengan pimpinan dayah.

Tradisi di atas umumnya masih dipakai di Aceh hingga hari ini. Baik *semeubeut* untuk para santri atau pendekatan yang digunakan dalam *meudrah* bagi santri yang belajar satu minggu atau satu bulan sekali. Tradisi *semeubeut* seperti ini menurut keyakinan sebagian besar orang Aceh bersumber dari ahli Suffah yang bersambung dengan Rasulullah

SAW., hingga terwarisi kepada generasi islam setelah itu [Tri Qurnati, 2007: 2-3]

❖ **Kurikulum *Semeubeut* di Aceh**

Di Aceh, kitab-kitab Islam klasik sering disebut kitab kuning oleh karena warna kertas edisi-edisi kitab kebanyakan berwarna kuning. Menurut Zamakhsyari Dhofier, “Pada masa lalu, pengajaran kitab-kitab Islam klasik merupakan satu-satunya pengajaran “formal” yang diberikan dalam lingkungan pendidikan” [Dhofier, 1985: 50].

Berdasarkan keterangan di atas bahwa kurikulum *semeubeut* di Aceh zaman lampau untuk tingkat dasar tidak ada kurikulum pasti karena fokus memperlancar bacaan Alquran. Adapun pada tingkat menengah pertama [*meunasah*] dan tingkat menengah atas [mesjid] memiliki kurikulum tetap. Kurikulum tersebut adalah Alquran, tajwid, tauhid, fikih, tasawuf, tarikh, ilmu bahasa Arab, muhadharah. Hanya saja perbedaan pada tingkat *semeubeut* di lembaga mesjid telah menggunakan kitab Arab [kitab kuning]. Ini menunjukkan bahwa sistem *semeubeut* di *meunasah* dan mesjid adalah konsentrasi pada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan *fardhu ‘in*.

Sedangkan pada tingkat *semeubeut* di dayah yang disetarakan dengan institut hari ini memiliki kurikulum sebagai berikut:

1. *Dār al-Tafsīr wal Hadīts* [interpretation and hadist Faculty];
2. *Dār al-Thīb* [Fakultas Kedokteran];
3. *Dār al-Kimiyyā* [Alchemy Faculty];
4. *Dār al-Tārīkh* [History Faculty];
5. *Dār al-Hisāb* [Mathematics Faculty];
6. *Dār al-Siyāsah* [Politics Faculty];
7. *Dār al-Aqlī* [Faculty Ilmu Logics];
8. *Dār al-Zirā'ah* [Faculty Pertanian];
9. *Dār al-Ahkām* [Faculty of Law];
10. *Dār al-Falsafah* [Faculty Philosophy];
11. *Dār al-Kalām* [Faculty of Theology];
12. *Dār al-Wizārah* [Fakultas Ilmu Pemerintahan];
13. *Dār al-Khazānah Bait al-Māl* [Fakultas Keuangan/Akuntansi Negara];
14. *Dār al-Ardh* [Fakultas Pertambangan];
15. *Dār al-Nahwu* [Fakultas Sastra Arab];
16. *Dār al-Madzāhib* [Fakultas Perbandingan Mazhab]; dan
17. *Dār al-Harb* [Fakultas Ilmu Militer] [Ismuha, 1978: 42-43].

Namun pada *fase* sekarang, kurikulum *seumuebut*

di Aceh baik pada tingkat *meunasah*, *mesjid*, *rangkang*, *dayah*, atau *meudrah* dapat konklusikan sebagai berikut:

I. Untuk mata pelajaran fikih, diajarkan kitab-kitab berikut:

1. *Kitab Matn al-Taqrīb* karya Abī Syuja' [w. 593 H.];
2. *Kitab al-Bajurī Syarah Matn al-Taqrīb* karya Syaikh Ibnu Qāsim [w. 918 H.]; dan
3. *Fatāwā Imam Nawawī* [w. 676 H.]

II. Bidang ilmu saraf kitab-kitab yang diajarkan di antaranya:

1. *Kitab Matan al-Bina w al-Asas fi 'Ilm al-Sharf*;
2. *Kitab Dammun al-Madkhal*;
3. *Kitab al-Kailani*; dan
4. *Kitab al-Matlub*, kedua kitab tersebut sangat masyhur di kalangan komunitas santri Aceh.

III. Ilmu Nahwu, mata pelajaran yang diajarkan di antaranya adalah :

1. *Kitab Matn al-Jarumiyah*;
2. *Kitab Matammimah*;

3. *Kitab Qatrunnada*;
4. *Kitab al-Khubari*; dan
5. *Syarah Ibnu 'Aqil*.

IV. Pelajaran tafsir Alquran kitab pegangannya adalah:

1. *Tafsir Jalālain*

V. Pelajaran 'Ulum Alquranyang diajarkan:

1. *Al- Itqān*

VI. Pelajaran Mantik yang diajarkan adalah sebagai berikut:

1. *Kuwaisuni Mantiq*;
2. *Idhāh al-Mubham*; dan
3. *Sabban*.

VII. Dalam ilmu Tasawuf yang diajarkan adalah sebagai berikut:

1. *Taisir Akhlāq*;
2. *Ta'lim al-Muta'alim*;
3. *Muraqi al-'Ubudiyah*;
4. *Sirāj al-Thālibin*; dan
5. *Ihya' 'Ulūm al-Dīn*

VIII. Dalam kitab Tauhid yang diajarkan adalah sebagai berikut:

1. *Aqīdah al-Islāmiyah*;
2. *Jauharah al-Tauhid*;
3. *Kifāyah al-'Awām*;
4. *Syarqawī*; dan
5. *Dusuqī*.

IX. Ilmu Ushūl Fiqh, kitab yang diajarkan:

1. *Nufhat 'alā Syarhil Waraqāt*;
2. *Ghāyah Wushūl*; dan
3. *Fawā'id al-Janiyyah*.

Semua kitab atau mata pelajaran di atas diajari berdasarkan kemampuan guru (*Teungku semeubeut*). Ada *Teungku semeubeut* yang kemampuannya bisa mengajari para santri hingga tingkat mata pelajaran atau kitab *Tuhfah al-Muhtāj*, namun ada juga yang hanya sampai hingga di mata pelajaran *Fath al-Wahab* [Hamdan, 2017: 116].

✿ Pertumbuhan Semeubeut Aceh

Beranjak dari fase *semeubeut* yang telah diuraikan sebelumnya, maka zaman sekarang adalah fase kemajuan *beut-semebeut*. Dimana sebelum fase ini

proses *semeubeut* di Aceh mengalami kemunduran karena penjajahan Belanda dan Jepang yang sangat lama di Aceh. Setelah Indonesia merdeka *beut-semebeut* kembali diaktifkan oleh beberapa ulama yang tidak ikut dalam peperangan mengusir penjajahan. Mereka diperintahkan pergi menuntut ilmu agar ilmu agama agar tetap menghidupkan ilmu.

Lalu berjalan masa maka perubahan sosial pun terjadi, membawa dampak juga kepada proses *beut-semebeut* di kalangan masyarakat. Cara pandang, cara berfikir dan cara bertindak masyarakat berubah dengan drastis terhadap fenomena keberagaman masyarakat. Dalam hal ini *beut-semebeut* harus mampu mengimbangi perubahan sosial yang terjadi di masyarakat untuk mengarahkan kepada hal-hal yang bersifat positif demi tegaknya *beut-semebeut* di kalangan masyarakat serta seorang *teungku* harus bisa memberikan solusi yang konstruktif sesuai dengan ajaran Islam yang dinamis, transformatif dan mengerakkan umat manusia untuk bangkit dari keterbelakangan menuju cahaya iman dan kemajuan ilmu pengetahuan [Amin, 2009: 224-225].

Selanjutnya Alquran yang sering dikemukakan untuk menunjukkan pandangan dan pesan Alquran

tentang keniscayaan perubahan sosial adalah surat al-Ra'd ayat 11 yaitu:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ
أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا
بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ
وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah, Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. [QS. al-Ra'd (13) : 11].

Perubahan sosial ialah suatu konsep inklusif yang menunjuk kepada perubahan gejala sosial berbagai tingkat kehidupan manusia dari mulai individual

sampai global seperti yang di kemukakan Lauer bahwa “*as an inclusive concept that refers to alterations in social phenomena at various levels of human life from the individual to the global*”, Aliran atau fungsionalisme pada tahap awal berkembang dalam antropologi sosial sebagai reaksi terhadap perspektif evolusionisme.

Oleh karena itu, proses *semeubeut* hari ini berbeda corak dengan fase sebelumnya, kendatipun kurikulum dan tradisi *semeubeut* tetap sama seperti sebelumnya. Namun, perubahan terjadi pada corak dan metode *semeubeut*. Hal ini mungkin saja efek dari pengaruh dari perubahan sosial masyarakat Aceh itu sendiri.

Berdasarkan keterangan di atas beberapa simpulan dapat dijelaskan bahwa sejak era kesultanan Aceh lembaga *semeubeut* sudah ada walaupun memiliki tingkat yang berbeda-beda. Tingkatan tersebut mungkin saja dapat disetarakan dengan lembaga pendidikan umum saat ini. Misalnya, Sekolah Dasar [SD], Sekolah Menengah Pertama [SMP], Sekolah Menengah Atas dan Universitas.

Pada tingkat pemula *semeubeut* dilakukan di rumah orang tua atau di rumah *teungku*. Pada tingkat ini anak-anak dibekali tentang dasar-dasar aqidah,

ibadah, dan muamalah. Anak-anak diajarkan supaya mengenal huruf-huruf Arab [hijaiyah]. Pengenalan ini penting sebagai pengantar untuk memahami membaca Alquran dan kitab. Setelah selesai pendidikan tingkat dasar dengan orang tua atau di *rumoeh teungku*, anak orang Aceh diantarkan ke lembaga *meunasah*.

Di *meunasah* mereka diajarkan ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu tarikh dan ilmu tajwid. Di tempat ini mereka diajarkan ilmu agama melalui pendekatan tradisi *talaqqi* atau *syafahhi*. Setelah selesai pendidikan di *meunasah*, anak-anak diantar ke lembaga mesjid. Pada tingkatan ini mereka diajarkan ilmu fiqih, ibadah, tasawuf, tarikh Islam, bahasa Arab [kitab kuning], bahkan termasuk sejumlah materi kitab yang dipahami dalam bahasa Arab Melayu.

Setelah selesai pada tingkatan masjid, para santri melanjutkan ke dayah. Di dalah mereka akan diperkenalkan sejumlah materi agama melebihi materi sebelumnya. Tradisi *semeubeut* di dayah biasanya duduk dengan cara *halaqah*, yaitu duduk dengan bersila sambil melingkar, dan ada juga duduk dengan liter U, sedangkan guru mengambil posisi di tengah. Duduk seperti ini merupakan tradisi yang

terus diwariskan dari dulu hingga hari ini. Hal ini dapat lebih menciptakan keakraban dan tumbuhnya sifat *takdhim* kepada sang guru. Sistem duduk halaqah tersebut disebut *talaqqi* atau *syafahhi*. Namun ketika sudah menjadi dewan guru maka tradisi *seumebeut* dengan metode *muzakarah*, *mubahasah* dan *mujadalah*. *usemebeut* ini dilakukan dengan pimpinan dayah.

Kurikulum *semeubeut* di Aceh baik pada level *meunasah*, mesjid, dayah, atau *beut meudrah* sebagai berikut: Kitab *Matn al-Taqrīb*, kitab *al-Bajurī Syarah Matn al-Taqrīb*, *Fatāwā Imam Nawawī*, kitab *Matan Bina*, kitab *Dammun al-Madkhal*, kitab *al-Kailani*, kitab *al-Matlub*, kitab *Matn al-Jarumiyah*, kitab *Matammimah*, kitab *Qatrunnada*, kitab *al-Khubari*, syarah Ibnu 'Aqil, *Tafsir Jalālain*, *Al-Itqān*, *Kuwaisuni Mantiq*, *Idhāh al-Mubham*, *Sabban*, *Taisir Akhlāq*, *Ta'lim al-Muta'ālim*, *Muraqi al-'Ubudiyah*, *Sirāj al-Thālibīn*, *Ihya' 'Ulūm al-Dīn*, *Aqīdah al-Islāmiyah*, *Jauharah al-Tauhīd*, *Kifāyah al-'Awām*, *Syarqawī*, *Dusuqī*, *Nufhat 'alā Syarhil Waraqāt*, *Ghāyah Wushūl*, *Fawā'id al-Janiyyah*.

Seiring dengan berjalan waktu dimana terjadinya perubahan sosial yang berdampak pada proses *semeubeut* dalam masyarakat Aceh. Sudut pandang, cara berfikir dan bertindak masyarakat

berubah drastis, terutama terhadap fenomena keberagaman masyarakat. Faktor ini setidaknya akan memengaruhi kaitan *Semeubeut* di Aceh. Untuk itu, *semeubeut* harus mampu melahirkan pendekatan yang dapat menyesuaikan dengan kondisi sosial yang ada dalam masyarakat. Seorang *teungku* harus mampu memberikan solusi konstruktif dalam mengembangkan cakrawala pendidikan sesuai dengan dinamisasi Islam, memajukan ilmu pengetahuan dan transformatif menuju kebangkitan ilmu pengetahuan di era baru [4.0].

❖ Masyarakat *Learning Society*

Learning Society adalah belajar tanpa mengenal usia. Masyarakat secara sadar larut dalam ilmu. Istilah ini merujuk pada pesan hadits, “belajarlah ilmu dari ayunan hingga ke liang lahat.” Walaupun ungkapan ini masih dipertanyakan oleh sebagian besar ulama, apakah hadits atau bukan karena menurut ilmu hadits ungkapan tersebut tidak diketahui sumbernya, namun semangat dari ungkapan tersebut menjadi inspirasi dasar muncul ungkapan “*Long life education*” [pendidikan seumur hidup] dalam dunia pendidikan. Maka belajar untuk mendapatkan ilmu

merupakan kunci kunci kemajuan dan kesuksesan seseorang menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Dari itulah Alquran menyatakan bahwa seseorang akan dimuliakan dengan ditinggikan derajatnya apabila ia memiliki ilmu.

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat [QS. Al-Mujadalah (58): 11]

Sumber di atas menandakan bahwa ilmu merupakan kunci keberhasilan dalam hubungana dengan agama atau dalam bermasyarakat. Imam Asy-Syāfi'i menerangkan:

الْعِلْمُ مَغْرَسٌ كُلِّ فَاخْرٍ فَافْتَحِرْ #
وَاحْذَرْ يَفُوتَكَ فَخْرُ ذَاكَ الْمَغْرَسِ

*Ilmu adalah ladang kemegahan maka berbanggalah #
Dan waspadalah luputnya kemegahan yang tertanam
itu [Diwan Imam Asy-Syafi 'i, Muliadi Kurdi (ed)]*

Keterangan di atas menandakan belajar adalah kunci kemajuan masyarakat. Beberapa aspek yang mampu menumbuh-kembangkan masyarakat belajar di antaranya adalah aspek budaya. Perspektif budaya menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan masyarakat belajar. Misalnya orang Aceh mempunyai budaya belajar yang tinggi. Mereka sangat mencintai ulama.

Kepada ulama [*teungku*] mereka belajar sejak usia kanak-kanak sampai senja. Dari itu, jangan heran di Aceh, hampir setiap desa memiliki *Balee Semeubeut* [surau] yang digunakan sebagai tempat berlangsung proses belajar mengajar. Di *Balee* ini mereka akan diperkenalkan akidah, akhlak, hidup bersosial dan pendidikan untuk mencintai kehidupan akhirat. Ilmu-ilmu ini sering diperkenalkan melalui pendekatan hikayat atau bahasa sastra seperti kitab *Akhbarul Karim*. Para pelajar di *Bale* biasanya didominasi oleh kaum tua. Merekalah yang mengundang *teungku semeubeut* untuk mengajarkan ilmu-ilmu keislaman.

Setelah belajar diharapkan mereka lebih mencintai akhirat, semakin bersemangat dalam membentuk kesalihan spiritual dan ibadah, juga dalam bersosial. Inilah bentuk kaderisasi generasi dalam masyarakat Aceh termasuk dalam kaderisasi seorang tokoh masyarakat. Karena standar seorang tokoh dalam masyarakat Aceh harus ditimbang dengan kecerdasan aspek spiritualis juga sosialnya.

Belajar merupakan aktivitas budaya yang bersifat universal, dan ini terjadi di setiap tingkatan masyarakat. Karena itu, belajar dapat dikelompokkan sebagai bentuk dari proses budaya. Sebagai proses budaya, belajar terjadi dalam masyarakat secara alami. Di Aceh terjadi pendidikan sesuai dengan kondisi budaya masyarakat agamis. Dari itulah belajar dalam masyarakat Aceh, sejak zaman dahulu, melalui semangat budaya yang ditopang nilai-nilai keislaman. Aktivitas belajar dimulai sejak berada dalam lingkungan keluarga, *rumoh beut*, *meunasah*, masjid dan dayah.

Nilai budaya pendidikan dalam keluarga di Aceh, *rumoh beut*, *meunasah*, masjid dan dayah seperti diterangkan sebelumnya sangat besar perannya dalam membentuk karakter anak. Perhatian lembaga

tersebut yang berawal dari pendidikan keluarga membuat anak Aceh kuat, sehingga mereka tidak latah dalam mengrespon perubahan. Karena itu, budaya belajar dalam keluarga, *rumoh semeubeut*, *meunasah*, *bale*, masjid hingga dayah perlu dipertahankan secara tradisi. Untuk mempertahankan tradisi ini, salah satunya dapat ditempuh melalui pendidikan malu. Orang tua menanamkan rasa malu dan rasa bersalah apabila ada di antara generasi mereka yang tidak bisa ngaji, faham agama atau memiliki akhlak buruk.

Berangkat dari prinsip di atas, orang Aceh sejak dahulu ada tradisi *semeubeut lheuh mageb* [ngaji setelah magreb]. Setiap orang tua akan menyisihkan waktu mereka setelah shalat magrib mengajarkan anaknya hingga waktu shalat isya'. Ungkapan *peuhu panyot lheuh meugreb* di Aceh mengandung makna serupa, yaitu setiap orang diwajibkan secara adat "belajar antara waktu magrib dan isya." Materi yang sering diperkenalkan antara masa ini adalah fiqah [fiqh], tarekh [tarikh Islam], ilmu tauhid, *beut* [membaca Alquran], mendengar ceramah agama, *meurukun*, *mesifeut*, belajar akhlak dan lain-lain.

Dalam waktu kurang lebih satu jam [antara setelah shalat mageb dan 'isyah] semua orang di Aceh sejak

zaman lampau melakukan kegiatan belajar. Setelah belajar ditutup dengan shalat 'isya berjama'ah. Budaya belajar seperti ini telah memberi dampak positif terhadap pembentukan keribadian anak di Aceh. Mereka memiliki kecerdasan multifungsional ketika terjun ke masyarakat.

Ketika menjadi masyarakat, lulusan *balee semeubeut* memiliki warna yang berbeda dengan lulusan lainnya. Kecenderungan mereka akan mudah diamati dalam bersikap dan mengambil sebuah keputusan. Pertimbangan agama dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan sering didahulukan. Budaya belajar semacam ini merupakan cerminan masyarakat belajar [*learning society*] yang pada hakikatnya bentuk masyarakat madani [modern]. Karena itu, tidaklah berlebihan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan Aceh pendekatan ini perlu dikembangkan kembali dalam masyarakat.

Di samping pendidikan keluarga, seperti diterangkan, *rumoh beut*, *meunasah*, *balè*, *ranggang*, masjid dan dayah merupakan lembaga yang memiliki kontribusi penting dalam mendidik generasi Aceh. Bentuk lembaga pendidikan ini tercatat tempat belajar paling awal di Aceh. Lembaga-lembaga ini dapat

dijumpai setiap *gampong* di Aceh. Apabila orang Aceh mendirikan sebuah *gampong* baik di Aceh maupun di perantauan pasti terlihat *meunasah*. Misalnya, ada *meunasah* Aceh di Ciputat, Jakarta. Selain tempat ini, terdapat beberapa lain di Nusantara dimana orang Aceh akan mendirikan *meunasah* di tempat mereka bermukim. Dari itulah *meunasah* pada dasarnya tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga dapat dimaknai lambang kebersamaan orang Aceh.

Di *meunasah*, orang Aceh bermusyawarah, belajar mengaji, belajar berbagai keterampilan, tempat orang mengadakan dakwah, mengadakan kenduri, mengadili pencuri dan berbagai perselisihan, tempat tidur pemuda lajang atau duda yang berpisah dengan isterinya dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Dulu, di sekeliling *meunasah* terlihat bangunan semacam pondok. Pondok ini dikenal dengan *bilek* [bilik], tempat anak muda belajar, mengerjakan pekerjaan rumah [PR] sekolah, atau mengerjakan tugas-tugas kepemudaan lainnya. Dengan demikian *meunasah* terbukti sebagai lembaga musyawarah dan lembaga pendidikan terpadu. Di tempat ini anak-anak dapat belajar berbagai ilmu agama, misalnya membaca Alquran, belajar ibadah, akhlak, tauhid, doa-doa,

belajar berbagai pantangan, *meusifeut*, *meurukon* dan lain sebagainya, seperti pernah disampaikan.

Ada unsur kosmopolitan pada diri anak muda di Aceh, yaitu kecenderungan *meudagang*. *Meudagang* yang lebih populer di sektor ekonomi, secara natural diadopsi untuk penyebutan kegiatan merantau untuk belajar, yang dalam istilah bahasa Arab disebut dengan *rihlah*. Setelah selesai belajar di *meunasah* anak-anak melanjutkan pendidikan ke dayah, yang biasanya berada di luar desanya. Untuk itu mereka meninggalkan desa pergi *meudagang*. Ada asumsi yang berkembang dalam masyarakat Aceh, semakin jauh pergi *meudagang* meninggalkan kampung halaman semakin banyak pula ilmu yang didapatinya.

Keterangan di atas menunjukkan *meudagang* merupakan salah satu jalan untuk memperoleh ilmu. Dari itu, prinsip ini mungkin sekali berpegang kepada amanah yang disampaikan oleh kita Imam Asy-Syafi'i. Beliau tercatat selama hidupnya jarang sekali bertemu dengan keluarganya. Hal ini disebabkan banyak waktu yang ia habiskan, *meudagang* [merantau] mendalami ilmu agama.

Asy-Syāfi'ī dan ibunya hidup berpindah-pindah [*meudagang*/merantau] mulai dari Gaza ke Makkah,

lalu ke Madinah. Kemudian mereka pindah lagi ke Yaman dan meneruskan perjalanan ke Bagdad. Seterusnya ke Makkah dan kembali ke Bagdad lalu ke Mesir sebagai tempat menikmati sisa umurnya. Perjalanan itu telah membentuk kekuatan fisiknya [Diwan Imam Asy-Syafi'I edisi bahasa Indonesia].

Kondisi berpindah-pindah yang terus menerus dan tak terhingga ini dari satu Negara menuju Negara lain yang pada saat itu menjadi pusat perkembangan Dunia Islam, adalah kesempatan emas bagi pribadi Asy-Syāfi'ī guna mempelajari watak maupun moral orang lain, dapat mengetahui kebaikan-kebaikan yang terpatri serta pola pikir mereka. Memahami sisi kehidupan dengan segala persoalan-persoalan yang dihadapi serta kebijakan dan sikap yang dapat diambil [Diwan Imam Asy-Syafi'I edisi bahasa Indonesia].

Menurut Asy-Syafi'i *meudagang*/merantau adalah sekolah yang mengajarkan seseorang bagaimana berinteraksi dan menyaksikan fenomena secara nyata, jauh lebih berpengaruh dibandingkan belajar formal yang diulang-ulang dan ditelaah secara terus-menerus [Diwan Imam Asy-Syafi'i edisi bahasa Indonesia, Muliadi Kurdi (ed)]. Dalam beberapa syair berikut Imam Asy-Syāfi'ī mengungkapkan:

مَا فِي الْمَقَامِ لِذِي عَقْلٍ وَذِي أَدَبٍ #
مِنْ رَاحَةٍ فَدَعِ الْأَوْطَانَ وَاعْتَرِبِ

*Tiada tempat bagi orang berakal dan beradab #
Untuk bersenang maka tinggalkan negerimu dan
merantauah [Diwan Imam Asy-Syafi'i edisi
bahasa Indonesia, Muliadi Kurdi, (ed)].*

سَافِرٌ تَجِدُ عِوَضًا عَمَّنْ تُفَارِقُهُ #
وَأَنْصِبْ فَإِنَّ لَذِيذَ الْعَيْشِ فِي النَّصَبِ

*Merantauah agar kau dapat pengganti dari orang-
orang yang kau tinggalkan # Dan bersungguh-
sungguhlah karena kenikmatan hidup setelah
bersungguh-sungguh [Diwan Imam Asy-Syafi'i
edisi bahasa Indonesia, Muliadi Kurdi, (ed)].*

إِنِّي رَأَيْتُ وَقُوفَ الْمَاءِ يُفْسِدُهُ #
إِنْ سَاحَ طَابَ وَإِنْ لَمْ يَجْرِ لَمْ يَطِبْ

Aku melihat air yang tergenang itu merusak (kejernihan) # Jika ia mengalir akan jernih dan apabila terendam dia akan keruh [Diwan Imam Asy-Syafi'i edisi bahasa Indonesia, Muliadi Kurdi, (ed)].

وَالْأَسَدُ لَوْلَا فِرَاقُ الْغَابِ مَا افْتَرَسَتْ #
وَالسَّهْمُ لَوْلَا فِرَاقُ الْقَوْسِ لَمْ يُصِبْ

Singa-singa jika tidak meninggalkan hutan tidak pernah memangsa # Anak panah jika tidak dilepas dari busurnya tidak akan terkena sasaran [Diwan Imam Asy-Syafi'i edisi bahasa Indonesia, Muliadi Kurdi, (ed)].

وَالشَّمْسُ لَوْ وَقَفَتْ فِي الْفُلْكِ دَائِمَةً #
لَمَلَّهَا النَّاسُ مِنْ عُجْمٍ وَمِنْ عَرَبٍ

Matahari jika terus berhenti pada porosnya # Orang 'Arab dan orang 'Ajam akan merasa bosan terhadapnya [Diwan Imam Asy-Syafi'i edisi bahasa Indonesia, Muliadi Kurdi, (ed)].

وَالْتَبَرُ كَالْتُّرْبِ مُلْقَى فِي أَمَاكِنِهِ #

وَالْعُودُ فِي أَرْضِهِ نَوْعٌ مِنَ الْحَطَبِ

Biji emas seperti debu jika masih di tempatnya
Kayu cendana sama dengan kayu api yang
tercampak di tanah [Diwan Imam Asy-Syafi'i
edisi bahasa Indonesia, Muliadi Kurdi, (ed)].

فَإِنْ تَغَرَّبَ هَذَا عَزَّ مَطْلَبُهُ #

وَإِنْ تَغَرَّبَ ذَاكَ عَزَّ كَالذَّهَبِ

Jika biji emas itu meninggalkan negeri asalnya,
maka menjadi mahal harganya; dan jika kayu
cendana itu meninggalkan negeri asalnya maka
ia pun tinggi semahal emas [Diwan Imam Asy-
Syafi'i edisi bahasa Indonesia, Muliadi Kurdi,
(ed)].

Pesan syair di atas terpatri dalam jiwa orang Aceh.
Karena itu, generasi Aceh zaman lampu banyak
meninggalkan kampung halaman pergi *meudagang*
untuk mencari ilmu pengetahuan dan pengalaman
hidup. Mungkin saja pengaruh *meudagang* itu

banyak cendekiawan dan ulama Aceh dikenal oleh masyarakat Melayu-Nusantara. Dari itulah, diyakini bahwa budaya *meudagang* dalam masyarakat Aceh merupakan ciri masyarakat kosmopolitan yang berwawasan yang menurut Nurcholis Madjid [1999] faktor tersebut menjadi pendukung budaya bagi reformasi di Indonesia.[]

✿ **Hak Dasar Pendidikan di Aceh**

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pengertian lain secara umum pendidikan adalah suatu proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekumpulan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian [<https://www.maxmanroe.com>, akses 20 Mei 2019]. Adapun fungsi pendidikan mengembangkan seluruh potensi kepribadian

peserta didik dalam mewujudkan masyarakat Aceh yang berperadaban dan berartabat.

Di Aceh pendidikan dibangun berdasarkan kerangka filosofis: Keislaman, keacehan, kebangsaan dan keuniversalan. Kehidupan masyarakat Aceh yang berbasis syari'at, adat istiadat dan pendidikan. Peran serta ulama berbeda dengan wilayah lain. Ulama ikut serta dalam penetapan kebijakan pembangunan di Aceh. Dari itu, peran ulama di Aceh bagaikan ruh dalam menggerakkan dan menjaga aksesibilitas pendidikan.

❁ Perspektif Yuridis Hak untuk Mendapatkan Pendidikan

Pasal 5 ayat (1) a dan e Qanun Aceh No. 5 tahun 2008, menegaskan prinsip penyelenggaraan pendidikan di Aceh adalah: "Pendidikan untuk semua orang tanpa membedakan suku, agama, ras dan keturunan" dan "mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan." Pasal 216 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 11/2006 tentang Pemerintah Aceh ditegaskan: setiap penduduk Aceh berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan Islami sejalan dengan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diselenggarakan atas prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, nilai Islami, budaya dan kemajemukan bangsa.

Hak dasar ini ditegaskan kembali dalam Qanun nomor 5/2008 tentang penyelenggaraan pendidikan pasal 7 sebagai berikut: "Setiap penduduk Aceh berhak mendapat pendidikan yang Islami dan bermutu." "Penduduk Aceh yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial serta memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak mendapat pendidikan khusus."

Anak yang berada pada kondisi tersebut tidak mungkin mengikuti pendidikan biasa, maka berhak atas pendidikan luar biasa. Peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak atas pelayanan khusus pendidikan. "Pendidikan layanan khusus ditujukan bagi peserta didik pada masyarakat adat, suku terasing, penduduk daerah terpencil dan perbatasan, korban bencana dan anak yang menghadapi masalah sosial." Pemerintah daerah berkewajiban menjamin pemenuhan hak tersebut dan wajib menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara di Aceh untuk

mengikuti pendidikan sekurang-kurangnya setara dengan tingkat pendidikan menengah. Anak usia sekolah yang tidak mampu membiayai pendidikan dibantu oleh pemerintah daerah.

Penerimaan peserta didik pada suatu satuan pendidikan dilaksanakan secara adil dan transparan tanpa membedakan jenis kelamin, agama, ras, status sosial dan tingkat kemampuan ekonomi, dengan tetap mengindahkan kekhususan dan atau jenis pendidikan yang bersangkutan. Peserta didik berhak atas perlakuan yang adil sesuai dengan kondisi fisik, mental, bakat, minat dan kemampuannya. Hal ini termasuk peningkatan akses pada PAUD dan pendidikan dasar [khususnya bagi anak-anak di daerah yang masih terbelakang], mengurangi tingkat buta huruf pada orang dewasa dan perluasan program-program kecakapan hidup berbasis masyarakat.

Dalam rangka menjamin pemerataan/akses atau peluang memperoleh pendidikan sebagai hak dasar masyarakat, maka di dalam Renstra Pendidikan Aceh [2007 s/d 2012] tertuang kerangka strategis sebagai berikut:

- ✧ Mengurangi hambatan biaya pada tingkat pendidikan dasar dan menengah sejalan dengan target pembiayaan untuk pelayanan pendidikan menengah;
- ✧ Meningkatkan efisiensi internal dan tingkat kelangsungan bersekolah di setiap jenjang;
- ✧ Mendorong partisipasi yang lebih besar dari masyarakat dunia usaha, pendidikan dan SMK melalui penetapan target dan didasarkan pada sisi permintaan; dan
- ✧ Menargetkan pengembangan fasilitas pendidikan yang memfokuskan pada upaya menghilangkan hambatan kesempatan belajar.

Untuk mengurangi hambatan biaya pada tingkatan pendidikan dasar dan menengah, strategi utama adalah:

- ✧ Mengurangi biaya yang dikenakan atas orang tua murid pada tingkat pendidikan dasar dan menengah melalui penghapusan sumbangan tidak resmi;
- ✧ Menyusun peraturan terhadap upaya pungutan biaya yang lebih transparan dan melakukan pembukuan sumbangan pendidikan yang diberikan orang tua murid untuk biaya

pendidikan dan pelatihan, penyediaan beasiswa, pembebasan biaya dan cara-cara lainnya;

- ✧ Penyediaan beasiswa/subsidi tertentu ke daerah-daerah miskin atau anak-anak yang berasal dari keluarga sangat miskin;
- ✧ Penyediaan tunjangan untuk pemuda/i putus sekolah agar dapat memperoleh kesempatan belajar pada program-program di jaringan pusat pendidikan masyarakat seumur hidup [CLLC];
- ✧ Memperluas target pemberian subsidi/beasiswa bagi murid-murid pilihan untuk menjadi guru pada lembaga pelatihan, dengan syarat bersedia ditempatkan di daerah terpencil dan mendapatkan tempat tinggal; dan
- ✧ Memperkenalkan dana *block grant* kepada dayah salafiyah, termasuk pemanfaatan sistem/program kembar antara madrasah/dayah salafiyah [Renstra Pendidikan Aceh, 2007-2012: 73-74].

Di samping itu, pasal 8 ayat (1) dan (3) Qanun no. 5/2008 menegaskan berikut: "Setiap penduduk Aceh yang berusia 7 sampai 18 tahun wajib mengikuti

pendidikan dasar dan menengah” ”Setiap penduduk Aceh berhak memperoleh pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya.”

Pasal 9 Qanun 5/2008 menegaskan tentang hak dan kewajiban peserta didik sebagai berikut.

❁ Peserta didik pada setiap satuan pendidikan di Aceh berhak:

- ❁ Mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- ❁ Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya;
- ❁ Mendapatkan beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu; pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
- ❁ Mendapatkan perlindungan dan perlakuan dari hal-hal yang bertentangan dengan norma agama, hukum, dan adat istiadat; dan
- ❁ Mendapatkan beasiswa dan penghargaan bagi peserta didik yang berprestasi.

❁ **Peserta didik pada setiap satuan pendidikan di Aceh berkewajiban:**

- Menjaga dan menaati norma-norma pendidikan untuk menjamin kelangsungan proses dan keberhasilan pendidikan untuk tidak mengkonsumsi, memperjualbelikan dan menyimpan rokok, minuman yang memabukkan, narkoba, dan obat psikotropika lainnya.
- Menghindari dan mencegah pornografi, porno aksi, perjudian dan khalwat.

❁ **Pasal 10 Qanun No. 5/2008 menegaskan hak dan kewajiban orang tua sebagai berikut:**

- Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi mengenai pendidikan anaknya;
- Orang tua wajib mendidik anaknya dalam keluarga dan bertanggung jawab atas kemampuan anaknya dalam usia pendidikan dasar untuk mampu membaca Alquran dan mengamalkan nilai-nilai syari'at Islam;
- Orang tua berkewajiban mendukung dan menghormati peraturan yang berlaku di setiap

satuan pendidikan; dan

- ✦ Orang tua berkewajiban untuk menghindari pengaruh lingkungan yang menurunkan prestasi pendidikan anaknya.

Keterangan di atas menunjukkan bahwa kegiatan pendidikan sebagai investasi besar bagi bangsa. Pendidikan tidak mungkin hanya dilaksanakan di sekolah saja. Pendidikan merupakan suatu proses mencetak generasi penerus yang hidup di dalam tri pusat pendidikan yang saling terintegrasi, yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam rangka membangun sinergisasi fungsional antara ketiga wahana pendidikan yang strategis tersebut.

Salah satu bentuk upaya konkrit saat ini untuk meningkatkan mutu pendidikan di Aceh adalah dengan meningkatkan partisipasi yang lebih optimal lagi terhadap penyelenggaraan pendidikan, dan salah satu upaya untuk mendongkrak partisipasi masyarakat adalah dengan mengakomodasi pandangan, ide, aspirasi dan menggali potensi untuk menjamin demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas.

Sikap di atas dinilai penting, karena merupakan

realisasi dari bentuk demokrasi berkeadilan. Hal tersebut bermakna, bahwa masyarakat tidak hanya mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu namun juga melekat kewajiban untuk ikut serta mengadakannya, baik dalam menyediakan dana untuk pengadaan, pengembangan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan maupun kepakaran atau keahlian yang diperlukan dalam penyusunan program serta implementasi mulai dari yang berskala makro hingga yang berskala mikro.[]



**MAJELIS PENDIDIKAN
DAERAH [MPD] ACEH
BENTUK PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN *MEUNASAH,*
DAYAH DAN BALÉ
*SEMEUBEUT***



✿ Bagian Awal

Mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran kondusif secara aktif pemerintah perlu dilengkapi sarana dan prasarana pendidikan. Salah satu sarana dimaksud adalah Majelis Pendidikan Daerah [MPD]. MPD dibentuk pada

tanggal 31 Agustus 1990 dengan SK Gubernur No. 420/435/1990. Kehadiran lembaga ini dalam rangka mengisi keistimewaan Aceh dalam bidang pendidikan. Hal ini tercantum dalam Surat Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia, No.1/Missi/1959. Dalam keputusan itu diterangkan bahwa Aceh memiliki keistimewaan dalam bidang agama, adat istiadat dan pendidikan.

Kehadiran MPD sejak dikeluarkan keputusan di atas diharapkan dapat mengawasi dan memberdayakan semua komponen masyarakat supaya ikut serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Dilihat dari fungsi, peran lembaga ini seperti halnya peran balee semeubeut, meunasah dan dayah di Aceh, yaitu mewadahi masyarakat supaya dapat memahi agama sehingga berguna untuk pengembangan diri dan masyarakat. Karena itu tugas dan fungsi MPD di Aceh [di daerah lain disebut Dewan Pendidikan/ DP] selaku badan yang mandiri, mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan [Kepmendiknas, No. 044/U/2002].

Di dalam pasal 56 UU No. 20 tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan [MPD/DP] sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkhis.

❁ **Perpektif Historis**

Secara historis, dalam kurun waktu yang panjang perjalanan sejarah bangsa, penyelenggaraan pendidikan dalam berbagai tingkat atau satuan, jenis dan jalurnya sepenuhnya untuk dan oleh masyarakat. Masyarakatlah yang membangun, memelihara dan mengontrol penyelenggaraan pendidikan, baik formal atau non formal. Mereka yang berinisiatif mendirikan sekolah, mengusahakan sarana dan prasarana serta media pendidikan.

Masyarakat mengusahakan penggalangan dana melalui iyuran bersama untuk membiayai operasional sekolah. Setelah selesai membangun sekolah, masyarakat mengajukan permohonan kepada pemerintah supaya memberikan tenaga guru

ke sekolah mereka bangun. Setelah pemerintah mengambil alih kepemilikan sekolah dan menjadikannya sebagai sekolah negeri atau madrasah negeri, intensitas tanggung jawab dan perhatian masyarakat menjadi berkurang.

Meskipun ada sekolah dan madrasah yang masih dikelola secara penuh oleh masyarakat, namun terhadap sekolah dan madrasah negeri, rasa memiliki [*sense of belonging*] dan rasa bertanggung jawab [*sense of responsibility*] dari masyarakat mulai menurun setiap waktu. Sejak itulah, masyarakat memandang bahwa pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Padahal tidak demikian. Islam membebani tanggung jawab bersama dalam membangun pendidikan generasi. Pendidikan anak sebagai generasi penerus bangsa tidak hanya menjadi urusan guru di sekolah, lembaga pemerintah, masyarakat tetapi juga keluarga [orang tua]. Hadits menerangkan tugas dan tanggung jawab ini sebagai berikut:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ أَوْ
يَمَجْسَانِهِ أَوْ نَصْرَانِهِ

Artinya: “Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, atau Nasrani.”
[HR. al-Baihaqi dan ath-Thabarani dalam al-Mu’jamul Kabir]

Fithrah dalam hadits di atas menunjukkan seorang anak yang dilahirkan dalam keadaan bersih [tauhid]. Dari itu, seperti pernah diterangkan pendidikan tauhid yang pertama dilakukan dalam keluarga si anak yang dimulai sejak penanaman bibit, usia kandung dan ketika lahir menjadi tanggung jawab keluarga. Dari itu, keluarga mempunyai pengaruh besar dalam membentuk perilaku seorang anak.

Meneruskan konsep hadits di atas dan sebagai bentuk perluasan lembaga *semeubeut* di Aceh kehadiran MPD sebagai mediator dalam menghubungkan kegiatan pendidikan keluarga dalam masyarakat dan pemerintah. Peran ini menjadi penting dikembangkan dalam masyarakat untuk menjawab segala permasalahan pendidikan.

Menteri Pendidikan dan Pelatihan Canada dalam suatu kesempatan mengungkapkan suatu untaian kalimat tentang partisipasi masyarakat Canada dalam pendidikan, “*our schools are at the heart of the*

community. They have a rich tradition of parental and community involvement in education" [Depdiknas RI, 2005: 1]. Artinya, sekolah-sekolah kita berada pada jantung komunitas [masyarakat]. Mereka memiliki tradisi yang kaya tentang keikutsertaan orang tua dan masyarakat dalam pendidikan. Demikian pulalah sebenarnya hakikat sekolah, *rumoh teungku*, *balee semeubeut*, *meunasah*, dayah dan perguruan tinggi di Aceh. Semua lembaga ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah Aceh. Dari itu, kehadiran MPD di Aceh sebagai saran pengembang dalam memfasilitasi keberlangsungan sistem pendidikan masyarakat dengan pemerintah.

Betapa banyak tenaga individual dan masyarakat ikut terlibat membangun lembaga pendidikan di desa-desa. Betapa banyak harta benda yang disumbangkan kepada dunia pendidikan baik berupa waqaf atau cuma-cuma. Belum lagi sumbangan berupa tanah untuk mendirikan sekolah, madrasah, dayah dan perguruan tinggi di Aceh. Untuk pengembangan sarana tersebut butuh lembaga pendidikan seperti MPD. Kehadiran lembaga ini seperti diterangkan, sebagai salah satu anugerah pemerintah pusat atas keistimewaan Aceh dalam bidang agama, pendidikan dan adat istiadatnya.

Setelah mendapat predikat istimewa, selain MPD pada tahun 1972 dibentuk lembaga Majelis Ulama [MUI]. Kemudian lahir Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh [LAKA] pada tahun 1967 dan pada tahun 2003 LAKA berubah nama menjadi Majelis Adat Aceh [MAA]. Sementara lembaga MPD sekalipun keistimewaan dalam bidang pendidikan telah diisi sejak tahun 1959, ternyata baru tahun 1990 lembaga ini terbentuk.

Dewan Pendidikan [DP] yang dibentuk pada tahun 2002 di seluruh Indonesia berdasarkan Kepmendiknas No. 044/2/2002, adalah badan yang mempunyai tugas dan fungsi yang sama dengan MPD di Aceh. Dilihat dari sisi sejarah, inisiasi muncul Dewan Pendidikan secara nasional, berasal dari Aceh, sebuah sejarah yang berulang. Karena sebelum kehadiran lembaga ini, Aceh menjadi inspirator kehadiran *Aceh Development Board* [ADB] yang sekarang dikenal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah [BAPPEDA] dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional [BAPPENAS], MUI, dan banyak lagi ide membangun yang lainnya. Semua itu kontribusi sejarah kehadiran lembaga-lembaga monumental yang bersumber dari Aceh.

❁ Perspektif Yuridis Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan

Peran serta masyarakat dalam pendidikan dinyatakan secara tegas dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN). Pasal 8 tentang hak dan kewajiban masyarakat, UUSPN menegaskan: “masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pendidikan”. Dalam pasal 9 UUSPN menetapkan “Masyarakat wajib memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.”

Pasal 11 ayat (1) dan (2) Qanun No. 3/2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ditegaskan bahwa “masyarakat berhak berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan”. “Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan dan tanggung jawab terhadap keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan pendidikan.”

Pasal 48 UUSPN ditegaskan kembali tentang skop peran serta tersebut secara lebih rinci sebagai berikut: a) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan

organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan; b). Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan, disebutkan bahwa peran serta masyarakat dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk:

- ✧ Pendirian dan penyelenggaraan pendidikan
- ✧ Pengadaan dan pemberian sumber daya pendidikan
- ✧ Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli
- ✧ Pengadaan dan/atau penyelenggaraan program pendidikan yang belum dilaksanakan pemerintah dalam menunjang pendidikan nasional;
- ✧ Pengadaan dana dan pemberian bantuan lainnya;
- ✧ Pengadaan dan pemberian bantuan sarana belajar [bangunan, buku];
- ✧ Pemberian kesempatan untuk magang;
- ✧ Pemberian pemikiran dan pertimbangan;

- ✧ Pemberian bantuan manajemen; dan
- ✧ Pemberian bantuan dan bentuk kerja sama.

Sehubungan dengan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan ini, maka pasal 56 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) menegaskan bahwa “Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui DP/MPD dan komite sekolah.”

Dengan demikian, kehadiran Majelis Pendidikan Daerah [MPD] sebagai mitra masyarakat dalam memajukan pendidikan daerah. Hal ini sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam visi dan misi Majelis Pendidikan Daerah Aceh, “Menjadikan MPD sebagai badan normatif yang proaktif dalam mengaktualisasikan perannya secara optimal sebagai mitra pemerintah dan masyarakat Aceh dalam melahirkan kebijakan-kebijakan pendidikan yang aspiratif, relevan dan akuntabel dalam rangka mencapai tujuan pendidikan, yaitu terwujudnya masyarakat yang cerdas, maju, beriman dan bertaqwa serta berakhlak mulia.”

Peran penting dari lembaga ini, mengembangkan

sistem pendidikan Islami di Aceh; Menyusun konsep pembaharuan dan peningkatan mutu pendidikan termasuk konsep pendidikan nilai-nilai [*values education*] yang sesuai dengan filosof dan budaya masyarakat Aceh yang Islami serta menyusun konsep-konsep pengembangan masyarakat belajar [*learning society*] dan memberikan pendapat dan saran kepada pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan pendidikan, seperti mengenai kurikulum, guru, ujian dan lain-lain.

✿ Mengawasi dan menilai pelaksanaan kebijakan dan program pendidikan

Memotivasi masyarakat pada umumnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan peningkatan mutu pendidikan serta memotivasi masyarakat untuk berinovasi dan berprestasi. Sebagai badan yang mewadahi serta menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat, Majelis Pendidikan Daerah [MPD] Aceh berfungsi sebagai badan normatif, berbasis masyarakat, independen dan sebagai ujung tombak dalam memajukan pendidikan di Aceh. Kehadiran lembaga ini menjadi lebih kuat lagi dari aspek legalitasnya sejak diwadahi dalam pasal 56 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional bahkan MPD Aceh lebih diperkuat lagi sejak lahir UU Nomor 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, serta UU Nomor 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Secara lebih rinci peran dan fungsi utama Majelis Pendidikan Daerah sebagai berikut: *Pertama*, sebagai *advisory agency*, berfungsi memberi masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah/DPRA/DPRK, mengenai kebijakan dan program pendidikan, kriteria kinerja pendidikan, kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan, kriteria sarana dan fasilitas, serta media pendidikan dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.

Kedua, sebagai *supporting agency*, berfungsi mendorong tumbuh perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang Islami dan bermutu, serta mendorong orang tua dan masyarakat, untuk berpartisipasi dalam pendidikan;

Ketiga, sebagai *controlling agency*, berfungsi melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan, menyusun standard dan kendali mutu;

Keempat, sebagai *mediating agency*, berfungsi melakukan kerja sama dengan masyarakat [individu dan organisasi], pemerintah daerah dan DPRA/DPRK berkenanan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat.

Sehubungan dengan peran dan fungsi tersebut, dapat dijabarkan secara lebih rinci ke dalam kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh MPD. Setiap fungsi MPD dapat dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan operasional MPD, yang dapat dipilah dalam beberapa fungsi manajemen, seperti fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pembiayaan [*budget*] sebagai berikut:

Peran pertama [*advisory*], wujud kegiatannya yaitu: Mengadakan pendataan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan sumber daya pendidikan dalam masyarakat; menganalisis hasil pendataan sebagai bahan pemberian masukan, pertimbangan dan/atau rekomendasi pendidikan kepada Pemda; menyampaikan masukan masukan, pertimbangan, dan atau rekomendasi secara tertulis kepada Pemda dengan tembusan kepada dinas/badan

teknis terkait; memberikan pertimbangan kepada Pemda dalam rangka pengembangan kurikulum; memberikan pertimbangan kepada Pemda dan atau dinas/badan teknis terkait untuk meningkatkan proses pembelajaran; memberikan pertimbangan kepada sekolah dalam penyusunan visi, misi, tujuan, kebijakan, pogram dan kegiatan; dan memberikan pertimbangan kepada Pemda dan atau dinas/badan teknis tentang pelaksanaan manajemen pendidikan [ketenagaan, keuangan, fasilitas dan data pendidikan].

Peran kedua [supporting] wujud kegiatan: Mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala dengan stake holder pendidikan; mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha serta dunia industri untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan yang bermutu di daerah; memotivasi masyarakat untuk meningkatkan komitmennya bagi upaya peningkatan mutu pendidikan; mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha serta dunia industri dalam penyediaan sarana dan prasarana serta biaya pendidikan untuk masyarakat tidak mampu; dan ikut memotivasi masyarakat dan semua *stake holder* pendidikan untuk melaksanakan kebijakan pendidikan, misalnya pelaksanaan jam wajib belajar

masyarakat dll.

Peran ketiga [controlling], wujud kegiatannya: Mengadakan rapat koordinasi dengan komite sekolah/komite madrasah; sering mengadakan kunjungan atau silaturahmi ke sekolah di kabupaten/kota; meminta penjelasan dinas terkait tentang hasil belajar; dan bekerja sama dengan Dinas/badan terkait untuk mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan di daerah Kabupaten/kota.

Peran Keempat [Mediator], wujud kegiatannya: Membina hubungan dan kerja sama yang harmonis dengan seluruh stake holder pendidikan, seperti dengan DUDI; mengadakan penjajagan tentang kemungkinan untuk dapat mengadakan MOU dengan lembaga lain untuk memajukan pendidikan; menyebarkan kuesioner untuk memperoleh masukan, saran, dan ide kreatif dari *stake holder* pendidikan; dan menyampaikan laporan kepada masyarakat secara tertulis tentang hasil pengamatannya terhadap perkembangan pendidikan [Depdiknas RI, 2005: 31-37]

Peran dan fungsi Majelis Pendidikan daerah [MPD] seperti diterangkan di atas merupakan sumber rujukan utama untuk menentukan kegiatan operasionalnya.

❁ **Problem dan Prospek MPD dalam Peningkatan Mutu Pendidikan**

Eksistensi MPD diperlukan bukan hanya sebagai wujud mengisi keistimewaan, tetapi juga banyaknya masalah pendidikan yang perlu dipecahkan untuk mengisi status Aceh sebagai daerah yang khas sesuai UU No. 11/2006. Karena itu sebagai badan normatif-independen, yang dibentuk Pemerintah Aceh setelah mendapat mendapat persetujuan DPR A.

Maka sejak tahun 2003 telah dirumuskan kembali fungsinya sebagai badan pemikir [*think tank*] di bidang pendidikan ini, sehingga badan ini melekat fungsinya sebagai badan pemberi pertimbangan [*advisory agency*], sebagai badan penggerak [*motivating agency*] masyarakat untuk secara maksimal berpartisipasi dalam meningkatkan mutu pendidikan, sebagai badan pengawas [*controlling agency*], sebagai badan perantara [*mediating agency*] antara masyarakat dengan pemerintah serta antara sekolah/madrasah dengan keluarga dan masyarakat.

Pasal 5 Qanun No. 3 tahun 2006, telah memberikan kewenangan bagi MPD sebagai berikut:

- ✧ Mengawasi dan menilai penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan baik negeri maupun swasta;
- ✧ Memberikan pendapat dan pertimbangan dalam menyusun rancangan anggaran pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; dan
- ✧ Menjaga standar mutu pendidikan mengembangkan sistem pendidikan Islami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Mencermati tupoksi dan kewenangan yang begitu besar yang diemban MPD, dan besarnya problem pendidikan daerah yang mesti dipecahkan, diperlukan suatu komitmen yang kuat ke depan untuk menjadikan MPD sebagai mitra pemerintah yang proaktif dalam mengaktualkan perannya lebih baik lagi, lebih optimal lagi, dan lebih menggigit lagi dalam melahirkan konsep dan pertimbangan-pertimbangan pendidikan, sehingga mampu memberikan ruh dan warna pendidikan di Aceh secara maksimal.

Di antara masalah yang dihadapi MPD dewasa ini tidak cukup kuat pengakuan peran sebagai badan pengawas, pengontrol dan pengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program-program pendidikan. Tidak

mudah bagi MPD untuk mewujudkan peran tersebut tanpa payung hukum yang kuat berupa regulasi tindak lanjut daerah sebagaimana diamanatkan oleh Qanun No. 3/2006 dan Qanun No. 5/2008, yang diikuti dengan kesediaan instansi-instansi dan badan-badan teknis agar membuka akses pengawasan yang lebar bagi MPD. Untuk itu MPD senantiasa mengagendakan program-program strategis untuk menata kembangkan tata aturan dan mekanisme kerja MPD, sehingga benar-benar MPD ini dapat mewujudkan misinya dengan baik.

Secara urutan, pengurus MPD sekarang ini dapat dikatakan sebagai pengurus MPD ke 4, sejak tahun 1990 MPD I dibentuk. MPD Priode I 1990-1995, terdiri dari Badan Pemikir dan Badan Pengurus, semuanya berjumlah 74 orang. Profilnya sangat gemuk. MPD 1996-2001 terdiri dari Pelindung, dewan Pertimbangan, Dewan Pimpinan dan Komisi-komisi semuanya berjumlah 65, berkurang sedikit gemuknya.

MPD 2003-2008 berubah drastis terdiri dari ketua wakil ketua 3 orang, komisi-komisi yang jumlah personalia semuanya hanya 11 orang, terlalu kurus. MPD 2008-2013 tidak jauh berbeda secara struktural,

dalam arti bidang-bidangnya, cuma berbeda sedikit dari segi jumlah personalianya semua berjumlah 19 orang, terdiri dari ketua, dan 2 orang wakil ketua serta 17 anggota komisi.

MPD meskipun sangat terbatas personalianya, namun telah melahirkan banyak sekali produk dan program yang sangat monumental, baik yang sifatnya lokal maupun bahkan nasional. MPD telah menciptakan banyak konsep dan model bahkan telah dipakai untuk skala nasional, antara lain konsep semester dan konsep Komite Sekolah, yang sekarang ini telah diberlakukan secara nasional. MPD juga telah mengkoordinasikan penyusunan Renstra Pendidikan, yang dapat dipandang sebagai produk yang sangat monumental dan bahkan diakui terbaik di Indonesia oleh Mendiknas.

Salah satu bentuk upaya konkrit saat ini untuk meningkatkan mutu pendidikan di Aceh adalah dengan meningkatkan partisipasi yang lebih optimal lagi terhadap penyelenggaraan pendidikan, dan salah satu upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat adalah dengan mengakomodasi pandangan, ide, aspirasi dan menggali potensi untuk menjamin demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas. Hal

ini dinilai penting, karena merupakan realisasi dari bentuk demokrasi berkeadilan.

Hal tersebut di atas memiliki makna bahwa masyarakat tidak hanya mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu namun juga melekat kewajiban untuk ikut serta mengadakannya, baik dalam menyediakan dana untuk pengadaan, pengembangan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan maupun kepakaran atau keahlian yang diperlukan dalam penyusunan program serta implementasi mulai dari yang berskala makro hingga yang berskala mikro [Budimansyah, 2006: 11].

Yang menjadi persoalan adalah siapa masyarakat itu? Masyarakat itu kenyataannya sangat kompleks dan tidak memiliki batas yang jelas, sehingga sulit menentukan masyarakat yang mana sebagai stake holder di bidang pendidikan. Salah satu cara untuk memfungsikan masyarakat sebagai stake holder tersebut adalah dengan menggunakan prinsip perwakilan, yaitu memilih sejumlah personal dari seluruh anggota masyarakat untuk melaksanakan fungsi-fungsi kontrol, pemberi masukan, pemberi dukungan serta fungsi mediator antara masyarakat

dengan lembaga-lembaga pendidikan. Fungsi-fungsi tersebut dilakukan MPD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dan komite sekolah di tingkat satuan pendidikan [Budimansyah, 2006: 11].

MPD di masa yang akan datang, harus menampilkan diri dengan peran dan fungsi yang lebih kontekstual dengan paradigma baru pendidikan Aceh yang Islami, sehingga badan yang di dalamnya berhimpun komunitas intelektual tokoh pendidikan ini, diharapkan sungguh-sungguh dapat berperan sebagai *think tank* pendidikan, yang kredibel, handal, dan profesional.

Mebutuhkan wawasan pemikiran yang rasional dan realistis untuk memecahkan berbagai persoalan pendidikan di Aceh. Di samping itu, dalam mengembangkan pendidikan Aceh ke depan membutuhkan kehadiran tokoh yang memiliki pemikiran filosofis dan inovatif dalam menetapkan arah dan kebijakan serta implementasi pendidikan. MPD harus mampu memberikan ruh dan warna pendidikan Aceh; meletakkan dasar yang kokoh dan strategi bagi pelaksanaan pendidikan yang Islami.

Mengingat masih banyak benang kusut pendidikan di negeri ini, tak terkecuali di Aceh, diharapkan MPD

mampu memberikan terobosan-terobosan yang berani dan berarti, dalam mereform benang kusut ini, terutama dalam meningkatkan mutu pendidikan. MPD harus menjadi *agent of change* bagi pendidikan Aceh masa depan. Mengingat besarnya tantangan di masa mendatang, MPD perlu diperkuat dan diberi kekuatan, untuk melaksanakan fungsinya melalui penguatan kelembagaan dan sumber daya secara berkelanjutan.

Untuk menjadi badan yang kredibel, profesional dan handal sebagai wadah peran serta orang tua dan masyarakat, MPD nampaknya masih harus menempuh perjalanan panjang dan berliku. Menjadi badan pemberi pertimbangan, pemberi dukungan, pengontrol dan sebagai mediator, juga bukanlah pekerjaan mudah sehingga terjawab dalam masa yang singkat. Bak kata pepatah, “ibarat layar telah terkembang, perahu tak akan surut kembali, tak pernah pulang sebelum mencapai tujuan.” Demikian juga kehadiran Majelis Pendidikan Daerah [MPD] di Aceh. Untuk mencapai citanya MPD Aceh harus bekerja keras, pantang mundur dan senantiasa hadir sebagai mitra dinamik dalam menghubungkan pesan pendidikan dalam masyarakat dan Pemerintah Aceh[]

IV



PERAN KOMITE SEKOLAH DAN DAMPAK TERHADAP PROFESIONALISME GURU



✿ **Bagian Awal**

Pendidikan merupakan kunci kemajuan dan perubahan di segala bidang. Pembangunan yang bergerak di bidang *human investment*, sektor pendidikan memegang peranan strategis dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul secara kompetitif, baik dari aspek imaniyah, ilmiah maupun amaliyahnya.

Perubahan paradigma manajemen pendidikan dari

sentralisasi ke desentralisasi, membawa implikasi semakin terbukanya peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dalam pelaksanaan pendidikan. Hal ini sesuai pula dengan usaha peningkatan kualitas pendidikan melalui konsep pendidikan yang berbasis masyarakat [*community based education*].

Untuk mewadahi peran serta *stake holder* pendidikan, maka dibentuklah komite sekolah yang merupakan amanah UU Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional. Pasal 56 UU No. 20 tahun 2003 menegaskan “Komite Sekolah/ Madrasah sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.”

Di samping pemberian otonomi yang lebih besar kepada sekolah, paradigma ini juga bertujuan mendorong pengambilan peran partisipatif yang melibatkan stakeholder pendidikan di sekolah, sehingga tercipta rasa memiliki [*sense of belonging*] dari mereka.

Di Aceh, kehadiran komite sekolah/komite madrasah semakin menemukan momentumnya yang lebih prospektif lagi, manakala dikaitkan dengan kekhasan daerah ini sebagai daerah yang memiliki payung yuridis berupa keistimewaan dan otonomi khusus melalui UU Nomor 44/tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan UU Nomor 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Ada nuansa baru dalam hal pembentukan komite sekolah, dibandingkan dengan BP3 dahulu. BP3 lebih menekankan pada fungsi-fungsi bantuan secara fisik dan material, sementara Komite sekolah berfungsi bukan hanya dalam menggalang partisipasi dan dana dalam pembiayaan pendidikan, tetapi juga berperan dalam menampung dan menganalisis aspirasi, pandangan, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat termasuk pengawasan terhadap tata kelola pendidikan, kurikulum, proses pembelajaran, kedisiplinan sekolah, kualitas *output* dan aspek-aspek manajerial lainnya.

MPD sebagai badan normatif yang berfungsi memberikan pertimbangan pendidikan, memiliki peran strategis dalam pemberdayaan Komite Sekolah di Aceh ke arah kemajuan.

❁ **Perspektif Yuridis**

Undang Undang Dasar (UUD) 1945, alinea ke 4 dinyatakan, bahwa salah satu tujuan negara adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan ini sekali lagi ditegaskan dalam pasal 31, yaitu setiap warga negara berhak mendapat pengajaran.

Dalam Qanun No 5/2006, ditegaskan: bahwa setiap peserta didik [hakikatnya orang tua] ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 31 dan 32 Qanun No. 5/2008 ditegaskan: Pendidikan pada dasarnya menjadi tanggungjawab orang tua, Pemerintah dan masyarakat; masyarakat berkesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan di daerah. Ketentuan mengenai peran serta masyarakat dalam pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diatur dengan Keputusan Gubernur, atas pertimbangan Dinas Pendidikan dan Majelis Pendidikan daerah. dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.

Pasal 32 Qanun No. 5/2008 ditegaskan sebagai berikut: Dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam pendidikan, pada setiap sekolah dibentuk komite sekolah; Satu komite sekolah dapat mencakup beberapa sekolah; keanggotaan komite sekolah terdiri dari unsur sekolah, orang tua/wali murid dan tokoh masyarakat; komite sekolah dibentuk dalam musyawarah masyarakat di sekitar sekolah; komite sekolah bertugas meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yang bersangkutan; masa kerja komite sekolah selama 5 [lima] tahun; dan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 31 dan 32 diatur dalam keputusan Gubernur atas Pertimbangan Dinas Pendidikan provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Majelis Pendidikan Daerah.[]

❁ **Pembinaan Karakter Generasi di Aceh**

Seorang tokoh dan sesepuh Aceh, mencurahkan isi hatinya dalam sebuah untaian kata berikut:

Siddiq dan amanah telah hilang//Hasad dengki telah berbilang-bilang//Iman dan taat menjadi luntur//Kasih sesama umat menjadi gugur//Larangan judi tak lagi digubris//Zina menjadi pekerjaan laris//Isteri dan anak menjadi durhaka//Melihat moral si

ayah meraja lela//Alam pun sangat murka//Turunlah banjir dan gempa [Ibrahim Hasan, 2003]

Ungkapan di atas dapat memberi jawaban dengan merujuk kepada perkataan Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan bahwa syari'at Islam adalah fondasi, kekuasaan adalah penyangga, dan pendidikan serta akhlak adalah pilarnya. Jika fondasi lemah maka bangunan di atasnya rubuh; tidak ada penyangga maka bangunan itu hilang; jika tidak ada pilar, maka kelengkapan lainpun akan rontok. Oleh karena itu fondasi harus dikuatkan, penyangga semakin diperkokoh termasuk segenap perangkat dan instrumennya; serta pilarnya perlu diberdayakan. Imam Asy-Syāfi'ī menerangkan beberapa sifat yang harus dimiliki dalam mengisi pembangunan pendidikan.

إِنَّ الْفَقِيهَ هُوَ الْفَقِيهَ بِفَعْلِهِ #

لَيْسَ الْفَقِيهَ بِنُطْقِهِ وَمَقَالِهِ

*Seorang fakih dapat dinilai dari perbuatannya #
Bukan dari ucapan atau tutur katanya [Diwan
Asy-Syafi 'I edisi bahasa Indonesia, Muliadi
Kurdi, (ed)]*

وَكَذَآ الرَّئِيسُ هُوَ الرَّئِيسُ بِخُلُقِهِ #
لَيْسَ الرَّئِيسُ بِقَوْمِهِ وَرِجَالِهِ

*Begitupun penguasa dilihat pada akhlnaknya #
Bukan pada kaum atau pengikutnya [Diwan Asy-
Syafi 'I edisi bahasa Indonesia, Muliadi Kurdi,
(ed)]*

Ungkapan di atas menerangkan bahwa hampir semua sisi kehidupan harus diisi dengan akhlak apalagi dalam aspek pendidikan. Aspek ini pendidikan berbasis akhlak mempunyai tujuan strategis dalam menjawab segala problema umat. Dalam konteks Aceh, pendidikan akhlak dipahami sebagai suatu pendidikan yang dilaksanakan dan dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Islami yang terkandung di dalam Alquran dan al-Hadits. Kedua sumber ini menjadi pilar penting bagi pengautan budaya dalam masyarakat Aceh. Dari itulah ukuran kualitas yang menjadi tujuan pendidikan di Aceh berbasis adat dalam paradigma Islam.

Pendidikan Islami [*Islamic Education*] merupakan sistem yang menjadi komitmen pemerintah dan

masyarakat dalam mengembangkan pendidikan akhlak di Aceh. Karena sistem pendidikan seperti ini dipandang sesuai dengan falsafah hidup dan sosio-kultural masyarakat pendidikan berbasis akhlak dalam masyarakat Aceh telah dikenal baik sepanjang generasi.

Komitmen ini semakin bertambah kuat setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 44/1990. Undang-undang ini memberi kewenangan kepada Aceh untuk mengembangkan pendidikan berdasarkan nilai-nilai Islam yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal [*local wisdom*]. Karena itu konsep pendidikan di Aceh dibangun atas dasar nilai-nilai keislaman dan keacehan; akhlak, kebangsaan dan keuniversalan. Dalam konteks keislaman dan keacehan, yang dimaksud bahwa akhlak menjadi sasaran utama dalam mengisi pendidikan di Aceh.

Secara lebih luas makna di atas dapat dijabarkan bahwa mengisi pendidikan Aceh tidak cukup sekedar mengisi substansi dari meteri yang diperkenalkan dalam suatu pengetahuan, tetapi juga harus diisi dengan nilai-nilai islami, meliputi nilai-nilai ketauhidan, akhlak mulia, nilai sosial kemasyarakatan dan lainnya. Dalam kaitan dengan

penerapan pendidikan di sekolah, seorang guru harus dapat wujudkan nilai-nilai dimaksud sehingga budaya Islami menjadi ruh yang menyemangati system pendidikan masyarakat di Aceh.

Dari itulah konsep pendidikan berbasis Islami sejatinya menjadi cerminan publik. Hal ini tentunya harus dimulai dari sebuah kebijakan, memasukkan ke dalam kurikulum dan menerapkan dalam kehidupan siswa sehingga nilai pendidikan yang ditawarkan ini menjadi *a way of life* [Islam sebagai falsafah hidup].

Dalam era milenium, umat Islam perlu semakin aktif melakukan berbagai gerakan dalam merekonstruksi sistem pendidikan karakter yang berbasis akhlak mulia. Usaha ini diharapkan mampu mengantarkan kembali kejayaan Islam sebagai pusat peradaban yang pernah gemilang. Aceh pernah menjadi sentrum peradaban Islam gemilang dalam beberapa dekade. Semua itu diyakini diisi atas dasar nilai-nilai keislaman dan akhlak keacehan.

Pendidikan karakter yang berbasis islam dan akhlak seperti diterangkan perlu digalakkan dengan berencana, berani dan sungguh-sungguh. Semua tujuan itu tentu harus mendapat dukungan dari semua pihak terutama Pemerintah Aceh dan

masayarakat. Karena sebuah konsep atau program yang rencanakan akan terealisasi dengan baik apabila mendapat dua unsur ini. Untuk itu, dalam mempercepat pendidikan berbasis Islam dan nilai-nilai keacehan menawarkan pemerintah Aceh di samping fokus mengisi pembangunan fisik juga memberi perhatian besar terhadap peningkatan kualitas tenaga guru sebagai pendidik. Misalnya, pemerintah dapat mendirikan LPTK model yang mampu melahirkan guru-guru berkarakter dan mampu mendidik anak dengan akhlaqul karimah. Menata kembali sistem pendidikan pada LPTK dengan memasukkan bidang studi pendidikan karakter yang berbasis nilai-nilai *akhlaqul karimah*. Melatih para guru yang sesuai dengan tuntutan pendidikan karakter yang berbasis nilai-nilai akhlakul karimah.

Perlu membangun sekolah percontohan sebagai *pilot project* pendidikan karakter berbasis Islam dan akhlak keacehan. Untuk mempercepat terlaksana program ini, Pemerintah Aceh dapat menempuh berbagai pendekatan, salah dengan mengeluarkan Qanun-qanun pendidikan. Selain itu, dalam upaya peningkatan mutu pendidikan berbasis Islam dan akhlak keacehan Pemerintah Aceh dapat memprakarsai program pertukaran guru dan dosen

[*teacher exchange program*] dalam bidang pendidikan karakter [*character Education*] dengan memilih wilayah yang sesuai dengan konteks pendidikan keacehan.

❁ Urgensi Pembangunan Karakter Bangsa Menghadapi Globalisasi

Secara historis globalisasi sebenarnya bukanlah fenomena baru bagi masyarakat. Karena pembentukan dan perkembangan masyarakat seiring dengan arus globalisasi yang tak mungkin terbandung. Sumber globalisasi tempo dulu adalah timur tengah, khususnya mula-mula Mekkah dan Medinah, berikut Bagdad, Cordova, Istambul, dan kota-kota negeri Islam lain sejak abad ke 19 dan awal abad ke 20 juga Kairo. Karena itu, seperti bisa diduga, globalisasi ini lebih bersifat religio-intelektual, lebih bersifat intelektual keagamaan, meski dalam kurun waktu tertentu juga diwarnai oleh semangat religio-politik.

Tetapi globalisasi yang melanda masyarakat hari ini dengan memperlihatkan sumber dan watak yang berbeda. Proses globalisasi, tidak lagi bersumber dari Timur Tengah, yang berbasis nilai-nilai moral Islami

[*akhlaqul karimah*], tetapi muncul dari dunia barat atau memperlihatkan model masyarakat barat yang menciptakan pengaruh-pengaruh, terutama dalam aspek ekonomi-politik dan sains-teknologi.

Hegemoni ekonomi, sains dan teknologi, meskipun telah diimbangi oleh beberapa kekuatan Asia seperti Jepang dan Korea, tetapi kultur hegemoni, sains dan teknologi tetap sarat dengan nilai-nilai sekularisme. Hegemoni di bidang-bidang ini bukan hanya menghasilkan globalisasi ekonomi, sains dan teknologi, tetapi juga dalam bidang-bidang lain, intelektual, sosial, nilai-nilai, gaya hidup dan seterusnya.

Hal yang sama juga dapat dilihat pada hegemoni telekomunikasi. Misalnya, munculnya keunggulan ITI hari ini dalam berbagai produk menandakan tingkat kemajuan sains-teknologi semata-mata mungkin bebas nilai. Tetapi tidak semua muatan yang diperkenalkannya cocok bagi pendidikan masyarakat. Karena sifat dari teknologi itu tidak pernah mengabaikan nilai imperialisme kultural yang merambah masyarakat. Dari itu, teknologi akan memberi pengaruh negatif bagi pendidikan akhlak generasi muda Islam. Dari itu generasi Islam

[terutama Aceh] yang hidup di zaman milenium ini, harus dapat dibendung dengan nilai-nilai Islam dan akhlak keacehan.

Iman, Islam dan Ihsan yang merupakan trilogi bagi kaum muda generasi Muslim baru bersifat keluar [exoteris], belum lagi bangkit merasuk ke dalam relung hati nurani yang paling dalam [isoteris] [Azra, 2009]. Keimanan belum merupakan pengawasan melekat [waskat] dalam arti yang sesungguhnya. Rasulullah SAW. bersabda, yang artinya “iman itu bukan hanya sekadar angan-angan belaka, namun ia harus ditambatkan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan” [H.R Bukhari].

Di tengah arus globalisasi yang kian merasuk tersebut, dengan dampaknya yang luar biasa seperti diterangkan dapat dipahami apabila pemerintah mendukung pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan Islam berbasis akhlak dan nilai-nilai lokal. Karena sebuah bangsa tanpa memiliki karakter, pastilah rapuh; kehilangan jati diri. Inilah yang dimaksud *character building* yang pernah disampaikan oleh Susilo Bambang Yudoyono beberapa waktu lalu.

Dalam kaitan di atas, sebuah konflik dalam

masyarakat atau di kalangan elit mudah terjadi akibat melemahnya karakter suatu bangsa [Menko Kesra Agung Laksono]. Karakter bangsa bisa mengambil sikap-sikap manusia yang baik yang diterima secara universal, kata Wapres Boediono, seperti ketulusan hati, kejujuran, mementingkan solidaritas dan kepentingan bersama [Tabloid Formula, 2010].

Bangsa maju adalah yang berkarakter yang unggul. Bila tidak maka arus globalisasi akan menggilasnya. Tak heran bila pemerintah melalui menteri-menterinya, kini mengusung pembangunan karakter bangsa sebagai salah satu fokus utama dalam pembangunan nasional. Jepang termasuk bangsa yang paling cepat maju di Aceh. Mereka terkenal dengan etos kerja yang tinggi dan pantang mundur. Bangsa Amerika tersohor dengan kebebasan dan *powerfull*. Bangsa Eropa kondang dengan intelektualnya. Bangsa Korea terkenal dengan karakter energik dan bangsa cina terkenal dengan kegigihan. Semua itu dapat ditunjukkan melalui karakter yang dimiliki oleh suatu bangsa. Demikian halnya Aceh yang diformat berdasarkan sejarah dengan karakter Islam dan adat istiadatnya. Ketika Aceh keluar dari nilai kecehannya artinya Aceh telah kalah karena membuang jati dirinya.[]



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB GURU DALAM INTEGRASIAN AGAMA DAN BUDAYA



❁ **Bagian Awal**

Berdasarkan konsep ekonomi, produktivitas nasional harus didukung oleh tersedianya Sumber Daya Manusia [SDM] yang terampil dan professional yang mampu menjalankan ekonomi produktif, namun, masih banyak kalangan yang mengatakan perlu adanya revitalisasi konsep manusia produktif. Diperlukan cara berfikir yang berbeda dengan pola

pemikiran makro-ekonomi, dalam membangun konsep manusia produktif secara lebih realistis melalui paradigma berfikir; pemahaman terhadap struktur dan sistem nilai yang dimiliki oleh manusia, sebagai perilaku ekonomi dalam kaitannya dengan produktivitas.

Beberapa negara maju yang dicontohkan memperlihatkan bahwa nilai dan sikap mental modern merupakan unsur penggerak yang paling ampuh dalam mencapai perkembangan yang diharapkan dalam bidang-bidang kehidupan ekonomi, politik dan sosial-budaya. Kemampuan manusia dalam menguasai satu cabang keahlian, keterampilan dan iptek sudah tentu sangat diperlukan [*necessary*] untuk mendukung produktivitas, namun belum dapat dikatakan mencukupi [*sufficient*].

Kemampuan teknis tersebut perlu terus diperbaharui dan diremajakan sesuai dengan perubahan aspirasi dan teknologi yang berlangsung tiada henti. Untuk itu diperlukan penanaman sistem nilai yang dapat mendorong dan memberikan semangat untuk memperbaharui kemampuan tersebut [Ace Suryadi dan Dasim Budimansyah, 2004: 68-69]. Budaya Aceh yang mendorong produktivitas

sesuai dengan etos kerja Islami, perlu ditanamkan kepada generasi baru agar kesinambungan budaya dapat diwujudkan. Di samping itu nilai-nilai budaya bangsa dapat dijadikan perisai terhadap berbagai pengaruh perubahan global yang dapat mengancam moral bangsa.

❁ **Integrasi Agama dan Budaya**

Budaya [*culture*] adalah karya manusia yang didasari pada olah rasa dan karsa yang secara verbal dan non verbal dipelajari dan dialami atau diterima secara intuitif dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat manusia itu sendiri [Anas M. Adam, dalam Darni M. Daud, 2005, 662]. Hornby [1980: 210] yang dikutip Anas M. Adam, mendefinisikan budaya, “*advanced development of body of the human power; the development of body, mind and spirit by education, training and or experience.*” Artinya, budaya adalah perkembangan terkini dari kekuatan manusia; pertumbuhan jasadnya, pemikiran dan semangatnya sebagai akibat dari proses pendidikan, pelatihan dan pengalaman.

Selanjutnya Treffry [2002] mendefinisikan budaya, “*ideas, customs and arts of particular society, a*

particular civilization at a particular period, a developed understanding of arts, a development or improvement by special attention or training.” Artinya, budaya sebagai ide, adat-istiadat dan seni kelompok sosial tertentu, sebuah peradaban pada priode tertentu, pemahaman yang berkembang tentang seni, perkembangan dan perbaikan sebagai akibat pelatihan khusus.

Kebudayaan lahir sebagai akibat kreativitas manusia, di mana kreativitas itu muncul karena mereka berinteraksi sesama manusia itu sendiri. Kebudayaan merupakan aspek ekspresi simbolik perilaku manusia, yang memengaruhi aspek kehidupan sehari-hari. Kebudayaanlah yang membentuk manusia dan manusia juga yang mewujudkan budaya dengan menunjuk kepada sifat interaktif dari keunggulan individual dalam mewujudkan budaya itu [Kitano dan Kirby, 1986].

Baker [1984] mengatakan kebudayaan adalah seperangkat penciptaan, penertiban dan pengelohan nilai-nilai insani yang diekspresikan kepada manusia lain, ekspresi itu berupa suatu simbol kemanusiaan yang dihasilkan dari alam, dan nilai-nilai itu dikembangkan sebagai kebutuhan spiritual. Menurut Koentjaraninggrat, [2000]. Ada lima orientasi nilai

budaya yaitu; konsepsi manusia tentang hidup konsepsi manusia tentang karya konsepsi manusia tentang waktu konsepsi manusia tentang alam konsepsi manusia hubungan manusia sesama manusia.

Banyak ahli lain mengemukakan definisi budaya, namun intinya sama, bahwa pelaku semua proses kebudayaan adalah manusia. Budaya dan manusia sebagai subjek pendidikan adalah sesuatu yang berkaitan erat. Proses budaya memerlukan kepada wadah transformatif yaitu pendidikan. Dengan pendidikan, kebudayaan dapat ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pendidikan dipandang sebagai wadah yang dapat mengawal erosi budaya itu sendiri sebagai akibat perubahan dan tantangan zaman. Karenanya antara pendidikan dan kebudayaan, ibarat ikan dan air.

Dalam setiap derap langkah pembelajaran para pendidikan dengan konserennya menanamkan nilai-nilai budaya yang telah berakar di masyarakat kepada anak didiknya. Karenanya menurut Tilaar [2003] sekolah-sekolah yang tidak menanamkan nilai-nilai universal dan nilai-nilai kultural suatu bangsa adalah cacat dari kaca mata pendidikan. Kalau sekolah sudah

cacat, maka akan melahirkan produk pendidikan yang cacat. Untuk itu perlu diadakan perubahan, pembenahan dan perbaikan dengan membina semua unsur yang terlibat dalam proses pendidikan.

Sistem nilai yang melekat pada budaya merupakan suatu sistem yang ada pada sistem budaya itu sendiri, sehingga agak rumit untuk dibedakan mana yang dikatakan budaya, mana yang dikatakan dengan nilai. Nilai budaya adalah suatu komponen budaya yang berdiri sendiri, di mana ketika nilai tersebut diinteraksikan oleh masyarakat dalam kehidupan sosialnya, maka yang diekspresikan adalah budaya yang identik dengan nilai tersebut.

Agama sebagai suatu pandangan hidup tidak bisa dipahami sebagai ajaran moral semata, tetapi agama memiliki sub-sub sistem yang berfungsi untuk menjaga kelanggengan ajaran agama itu sendiri, seperti adanya Tuhan, manusia dan alam. Untuk mengetahui semua itu sistem pemahaman nilai agama. Ketika nilai agama menjadi latar belakang yang membentuk jati diri budaya, maka yang muncul ke permukaan adalah budaya yang religius dan mendudukan agama pada posisi yang tidak dapat ditinggalkan.

Sistem nilai tersebut tidak kaku, ia berdiri dinamis di belakang budaya. Akan tetapi masing-masing sub sistem nilai tersebut juga hidup dan tumbuh sejalan dengan interaksinya masyarakat dengan manusia yang memerankan budaya tersebut, sehingga dalam mengisi konfigurasi budaya peran nilai sebagai konsep, budaya dan manusia sebagai subjek, saling mengisi sesuai dengan perannya masing-masing.

Terkadang interaksi sosial sering dipandu oleh nilai agama, dan adakalanya pemahaman terhadap ajaran agama dalam dimensi sosialnya dapat disesuaikan dengan dengan konteks interaksi sosial yang selalu baharu menurut waktu, tempat dan masa, maka akan terjadi pergeseran nilai atau pergeseran budaya.

Dalam konteks masyarakat Aceh, yang sejak berabad-abad yang lalu telah meletakkan ajaran agama menjadi panduan hidup dan pola tingkah laku masyarakatnya, maka dengan sendirinya ajaran Islam adalah “konsep utama yang memainkan peran dalam sistem budayanya, yang kemudian terbentuklah budaya Islam. Akan tetapi ketika pemahaman terhadap sistem nilai keagamaan itu merendah, dan agama menjadi yang dinomorduakan, maka akan terjadi proses akulturasi pada sistem budaya itu sendiri.

Pendeklarasian Syariat Islam beberapa waktu yang lalu, sebagai pengejawantahan dari UU No. 44 tahun 1999. Ini menjadi momentum dalam memperkuat eksistensi budaya masyarakat, bukan sebagai upaya untuk memulai sesuatu yang belum ada. Islam dan budaya Islami telah berakar kuat dalam masyarakat Aceh sejak Islam menapak kaki di wilayah ini.

❖ Kedisiplinan dan Kesejahteraan Guru

Kedisiplinan guru merupakan suatu variabel lain yang berkontribusi dalam pencapaian mutu pembelajaran dan hasil belajar siswa. Tingkat kedisiplinan relatif kurang, disebabkan akses transportasi, komunikasi dan ekonomi masyarakat yang masih belum pulih di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Aceh.

Kesejahteraan [insentif] yang diterima guru dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan seharusnya menjadi pembicaraan penting di kalangan pemerintah dan pemerhati pendidikan. Karena pendekatan ini merupakan salah satu jalan penting untuk meningkatkan prestasi guru yang berefek pada peningkatan kualitas murid.

❁ **Dampak Profesionalisme terhadap Pembelajaran**

Mutu pendidikan dapat diukur dari cara guru mengajar, menjelaskan, mentransfer pengetahuan, keterampilan dan sikap di dalam kelas atau melalui kegiatan di luar kelas. Guru juga dituntut untuk dapat meningkatkan kemampuan, wawasan dan kreativitas dalam membimbing siswa, serta dapat memberikan keteladanan yang baik kepada siswa. Kurang profesional guru dipakai sebagai salah satu alasan bagi rendahnya mutu pendidikan bahkan jauh tertinggal dari daerah lain. Rendah kualitas guru menjadi permasalahan yang berlarut-larut dan belum pernah terselesaikan secara tuntas [Harahap, 2005: 184-185].

Berbagai persoalan guru tersebut ditimbulkan oleh berbagai penyebab langsung ataupun tidak langsung, masing-masing saling berpengaruh satu sama lain. Misalnya, ketidakmampuan dan keterbatasan diri dalam mengikuti perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Masalah pendidikan tidak terlepas dari adanya tuntutan perubahan dunia yang berlangsung dengan cepat. Sudah seharusnya institusi/lembaga pendidikan termasuk tenaga pendidik dapat

menyesuaikan diri dengan adanya perkembangan yang terus berubah [Harahap, 2005: 184-185].

Kriteria apa yang harus dimiliki oleh seorang guru yang profesional? *Pertama*, menguasai ilmu yang harus diajarkan kepada siswa. *Kedua*, mampu mengajarkan mata pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya dengan cara yang objektif, jelas dan dapat meresap dan mengerti pada anak-anak didik yang diajar. *Ketiga*, mengikuti proses kemajuan zaman dan teknologi informasi yang terkait dengan pengembangan materi, metode dan evaluasi pengajaran dan akhirnya mengajarkan siswa agar guru dapat menjadi panutan dan keteladanan bagi anak-anak didiknya [Supriadi, 1998].

Menurut Jacki Parker, mengajar berarti meninggalkan warisan untuk planet ini. Mengajar bagi saya menyentuh keabadian. [Sannet, 2003:2]. Amy Monroe Denny mengatakan guru adalah salah satu profesi yang paling berpengaruh di dunia. Kami melatih pemimpin, dokter, insinyur dan ilmuwan masa depan [Sannet, 2003: 5]

Jabatan guru merupakan jabatan profesional yang menuntut keahlian [*expertise*], yang terlatih dan disiapkan secara khusus untuk melakukan

okupasi tersebut. Keahlian diperoleh melalui profesionalisasi, yang dilakukan baik sebelum seseorang menjalani okupasi tersebut [*preservice training*] maupun setelah menjalaninya [*in-service training*]. Profesionalisasi merupakan serangkaian proses pengembangan profesional [*professional development*] secara sistemik dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kemampuan para anggota profesi dalam mencapai kriteria yang standar dalam performance akademiknya maupun performance skill dan sikapnya.

Berkenaan dengan kompetensi guru yang meliputi: intelektual, sikap dan kepribadian serta keterampilan (*skill*), minat dan motivasi, kemampuan menerapkan metodologi, penguasaan materi/bahan ajar, termasuk masalah kedisiplinan dan kesejahteraan [*insentif*] yang diterima guru. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, para praktisi, Pengawas dan tokoh masyarakat [sebagai responden dalam penelitian ini], sehubungan dengan peningkatan kemampuan dan kualitas guru secara profesional, terungkap bahwa faktor guru sangat menentukan.

Guru yang mengasuh bidang studi yang di-UN-kan

rata-rata baik. Minat guru mata pelajaran tersebut cukup antusias dalam mengajar, disertai dengan motivasi yang tinggi dan kedisiplinan yang memadai, karena di daerahnya kepala dinas Pendidikan juga turun memantau proses pembelajaran di setiap sekolah termasuk kinerja kepala sekolah dan guru. Profesionalisme guru-guru bidang studi yang di-UN-kan rata baik dan memiliki motivasi kerja yang baik pula. Profesionalisme guru beragam ada sebagian yang bagus dan sebagian lain lemah. Menurut Zainuddin Yusuf [43 tahun tokoh masyarakat] profesionalisme guru mata pelajaran yang di-UN-kan sangat tergantung pada lama atau tidaknya sekolah tersebut.

Selebihnya dianggap tidak mampu mengajar, ada yang tidak menguasai materi/bahan ajar, tidak mampu mengelola kelas, tidak disiplin, ada juga guru yang mengajar bukan bidangnya, tidak mampu menggunakan alat-alat laboratorium yang sudah ada karena tidak tahu dan kurang memahami. Katanya, mengapa dahulu tidak ada laboratorium, tidak ada perpustakaan dan tidak memiliki fasilitas yang memadai, namun kualitas mengajar guru cukup bagus.

Responden mempertanyakan, mengapa di Akademi militer lebih mantap kualitasnya dibanding dengan di LPTK. Hal ini, bisa jadi disebabkan karena di samping faktor kedisiplinan, terkait pula dengan sistem perekrutan dan seleksi para guru yang tidak lagi atau kurang mempertimbangkan kriteria-kriteria yang sesuai dengan kode etik guru sebagai seorang pendidik yang profesional sebagaimana yang diharapkan. Ada kemungkinan secara subjektivitas, bahan instrumen tes yang dipakai untuk menjadi guru kebanyakan bahan-bahan yang dites di luar keprofesian guru.

Seorang guru seharusnya merasa terpancang dan memiliki kesadaran yang tinggi, minat dan motivasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, meningkatkan kemampuan dan kualitas sesuai dengan peluang dan kesempatan yang ada. Guru perlu banyak belajar mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari berbagai media, atau melalui program penyetaraan, seminar, lokakarya, pelatihan dan penataran, sehingga mereka tidak tertinggal oleh perkembangan zaman.

Di samping, memiliki wawasan yang luas, menguasai materi/bahan ajar yang memadai dengan

metode pembelajaran yang bervariasi dan guru yang tidak merasa canggung bila berhadapan dengan murid-murid yang berprestasi. Kendala-kendala yang menghambat mereka dalam meningkatkan kemampuan dan kualitas adalah masalah waktu dan membutuhkan biaya yang besar.

Mutu dan kedisiplinan guru adalah penentu meningkatnya mutu proses dan hasil belajar. Rendahnya mutu proses dan hasil belajar disebabkan rendahnya mutu guru. Solusinya, guru harus dididik khusus selama lebih dari satu bulan efektif. Penataran mingguan ternyata tidak efektif. Untuk melaksanakan sebuah pelatihan diperlukan persiapan yang sistematis dan matang, agar memperoleh hasil yang maksimal. Dari itu, seorang guru butuh materi latihan yang sesuai dengan kebutuhan; professional dalam penyajian baik secara teoretis maupun aplikatif.

Guru yang kompeten dan bermutu dapat mewujudkan ofensif pembelajaran yang dapat melambungkan tingkat kelulusan siswa dalam UN yang tingkat disparitasnya tinggi. Muhammad Surya [2003: 5] mengatakan empat kompetensi yang diperlukan dalam mewujudkan ofensif pembelajaran, yaitu (1) *plu-*

rality competence, yaitu kecakapan untuk mengidentifikasi aspek produktif dari adanya keragaman, dan toleransi dan menggunakannya secara efektif, (2) *socio-communicative competence*, yaitu kecakapan untuk berinisiatif, mengembangkan, mendukung dan mengelola menyimpulkan secara cepat proses-proses sosial, (3) *transition competence*, yaitu kecakapan untuk beradaptasi dengan proses transisi dalam kehidupan, dan (4) *equilibrium competence*, yaitu kecakapan dalam menjaga ketidak seimbangan dalam kondisi ketidakpastian. Dengan modal kompetensi ini, guru dapat melaksanakan suatu proses pembelajaran yang mampu mengembangkan SDM yang kreatif dan adaptif terhadap tuntutan yang berkembang.[]



PERANAN PENDIDIKAN DALAM PEMBERANTASAN HIV/AIDS



✿ **Bagian Awal**

Problem moralitas yang menimpa masyarakat dewasa ini semakin memprihatinkan. Pasca tragedi WTC 11 September 2001, bangsa Afganistan dan Irak terjadi perang secara intensif. Kedua Negara ini hamper setiap harinya dihujani ribuan peluru dan bom yang meluluhlantakkan negeri tersebut. Sementara negeri kita dibombardir oleh bom-bom tindakan susila, pornografi, dan sabu [narkoba] yang tidak pernah henti. Kenyataan ini dapat dijadikan

renungan bersama. Irak dan Afghanistankah yang paling menderita atautkah generasi kita yang menderita akibat perilaku a susila, pornografi, sabu-sabu, dan sejenisnya.?

Ketika seorang manusia meninggal, saat itu pula riwayat hidupnya di dunia berakhir, buku pun ditutup, layar panggung diturunkan. Namun, jika seorang mati secara a moral, dia cap [stempel] sampai 7 [tujuh] keturunan. Kehancuran fisik, kerugian harta belumlah seberapa dibandingkan kehancuran moral yang terwarisi kepada generasi secara turun temurun.

Dalam puluhan tahun terakhir, produk-produk asusila, di tanah air bermunculan seperti cendawan yang tumbuh di musim hujan, ironisnya penduduk negeri ini menyambut dengan antusiasnya; egois, tidak pernah memikirkan nasib genesasi bangsa setelahnya. Inilah bagian dari fenomena sosial yang meresahkan. Merembaknya produk-produk tersebut sebagai cerminan kondisi sebuah masyarakat yang sedang sakit. Ketika membiarkan kondisi ini terus merembak, kata orang tua, alamat bangsa dan negeri ini gulung tikar.[]

❁ **Faham Hedonisme Faktor Pemicu Penyimpangan Instrumen Birahi**

Aksi a susila terdiri dari berbagai perilaku yang tidak terpuji baik dalam pandangan agama maupun Negara. Misalnya, pornografi, LBGT, sabu-sabu, narkoba dan lain. Serangkain penyakit sosial ini telag difungsikan sehingga menjadi kebutuhan bagi manusia. Mereka tidak pernah menyadari, serangkaian perilaku ini menyimpan seribu keburukan di dalamnya.

Efek dari kecanduan dari penyakit sosial di atas berimbas pada ketidakyamanan hidup baik bagi si pelaku maupun meresahkan masyarakat. Efek bagi si pelaku akan terjadi bunuh diri, kerapuhan jiwa dan fisik, disharmoni pergaulan, disharmoni keluarga dan sosial, kekerasan seksual, seks bebas, pelacuran, aborsi, penyakit menular seksual, HIV/AIDS. Sementara dalam aspek bangsa dan Negara, hilangnya kekuatan dan jati diri untuk mengembangkan suatu bangsa dan Negara apabila generasi muda larut dalam perilaku a susila.

Keterangan di atas dapat merujuk kepada petunjuk agama. Islam selalu memperingatkan akibat meluasnya perbuatan amoral, Allah SWT. akan menimpakan coba-cobaan dan peringatan keras ke

atas kita agar kita mau kembali ke jalan yang lurus. Tabiat perilaku yang salah seperti seksual yang salah telah diingatkan Allah melalui kisah kaum 'Ad yang dikenal dalam sejarah. Kaum ini telah divonis melalui batas. Mereka melakukan penyimpangan sek di luar kebiasaan yang digariskan. Dari itu mereka berhak mendapat azab.

Tidak dapat dipungkiri, siksaan Allah SWT. yang terjadi hari ini tidak selalu berupa bencana seperti gempa bumi, banjir, puting beliung, tanah longsor, letusan gunung berapi, semburan lumpur panas, kekeringan, awan dan bahkan masih banyak bencana lainnya. Meskipun, dalam banyak peristiwa kita saksikan kaitan antara merebaknya perbuatan amoral dengan terjadinya bencana alam. Allah mampu juga memberi siksa dalam bentuk bencana sosial, termasuk muncul beragam penyakit seksual yang sangat sulit dicarikan obatnya ini.

Sejak teknologi komunikasi berkembang pesat, masyarakat mulai terbiasa dengan suguhan acara-acara yang mengeksploitasi aurat yang bisa ditemukan dalam bentuk sajian film, sinetron, iklan, klip musik, kuis fitness dan lain-lain. Gegap gempita penyambutan masyarakat terhadap goyang ngebor

sejumlah artis adalah bukti nyata tak terbantahkan. Bahkan sang artis tersebut telah menjadi ikon bagi kalangan tertentu yang merasa muak dengan sifat-sifat sok suci sebagian kalangan lain.

Selain indoktrinasi kultural melalui media televisi, perluasan pornografi juga didukung oleh merebaknya demam cyber media yang disebut internet. Hanya dengan uang logam recehan seorang remaja bisa menjelajahi dunia informasi global, tanpa sekat, tanpa sensor. Dengan satu klik saja, seseorang bisa berpindah dari situs luhur ke situs paling keji, situs porno. Internet adalah rahmat dari kemajuan gilang-gemilang di bidang teknologi informasi digital. Namun persoalannya, kemajuan itu berhasil diendus dengan sempurna oleh sementara orang yang bermental jahat, yang menghendaki kehancuran umat manusia berikut anak turunannya.

Kecanggihan internet dapat menyebarkan budaya positif dan negative. Namun, diperkirakan penyebaran budaya negative besar peminatnya ketimbang positif. Para penyebar budaya negatif sangat mudah menyebarkan luaskan berita-berita bohong, budaya kehinaan dan perbuatan keji secara *massive* ke masyarakat. Dari itulah dapat diklaim

bahwa era modern identik dengan hedonisme, yaitu suatu keyakinan bahwa kesenangan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam hidup. Era seperti ini, setiap orang didorong untuk terus berlomba mengejar kesenangan hawa nafsu, bahkan terkadang telah menjadi tujuan hidup itu sendiri. Akibat logis dari menyebarnya paham hedonisme ini, umat manusia tertutup mata dan telinga untuk membabi buta [QS. Al-Baqarah (2): 18], mengabaikan nilai agama, moral, budaya, etika, dan lain-lain. Mereka larut larut dalam kesenangan dan hawa nafsu. Dari itulah, karakter kebangsaan dapat dilakukan melalui penguatan budaya lokal yang di dalamnya banyak diperkenalkan kepada generasi untuk mencintai budaya-bangsa.[]

❁ AIDS/HIV

Generasi muda perlu diberikan pendidikan tentang AIDS/HIV supaya mereka sadar terhadap bahaya penyakit ini. AIDS kependekapan dari *Acquired Immune Deficiency Syndrome*. Sementara HIV dari kata *Human Immunodeficiency Virus*. HIV tidak mudah menular, tetapi sekali tertular selam hidup virus tersebut bersarang di dalam tubuh manusia. HIV

merusak kekebalan tubuh, menimbulkan penyakit *opportunistic* [<https://www.alodokter.com>, akses 22 April 2019]

Beberapa minggu setelah tertular penyakit ini, seseorang biasanya mulai merasakan gejala flu selama bertahun-tahun [5-10 tahun] masa sehat, tidak banyak gejala [limfosit CD4 masih >500] infeksi HIV intermediate [CD4: 500-200], infeksi HIV lanjut/AIDS [CD4 <200], berbagai infeksi *opportunistic*/kanker kematian. Kini perjalanan penyakit dapat diperlambat dengan obat *antiretroviral* [ARV]. [<https://www.alodokter.com>, akses 22 April 2019]

Cara penularan penyakit AIDS/HIV adalah melalui seksual [hetero maupun homo seksual, infeksi menular seksual mempermudah penularan] narkoba suntik, transfusi darah/transplantasi jaringan penularan dari ibu ke bayi [dalam kandungan, selama persalinan, pemberian asi] AIDS gejala mayor berat badan turun >10% diare kronik > 1 bulan demam > 1 bulan gangguan kesadaran/neurologi deensia/ensefalopati AIDS: gejala minor batuk menetap >1 bulan dermatitis generalisata Herpes zoster berulang kandidiasis orofaring Herpes simpleks progressif limfadenopati generalisata infeksi jamur alat kelamin

berulang [<https://www.alodokter.com>, akses 22 April 2019]

❁ **Perang Terhadap AIDS/HIV**

Menurut perhitungan WHO (1992), tidak kurang dari 3 orang di seluruh dunia terkena virus AIDS setiap menitnya, atau 3×1.440 menit sama dengan 4.320 orang setiap harinya. Dalam konferensi AIDS di Vancouver, Kanada (1996) dinyatakan setiap satu menit tertular 5 orang, 5×1.440 sama dengan 7.200 orang setiap harinya [Dadang Hawari, 1999: 90].

Berarti setahun 365×7.200 sama dengan 2.628.000. orang tertular AIDS. Kalau 50% saja yang tidak bisa diselamatkan dari penyakit yang cepat merenggut nyawa ini, berarti setiap tahun sekitar 1.314.000 meninggal dunia karena AIDS. Menurut data Komisi Penanggulangan AIDS [2005: 1] sampai dengan tahun 2005, setiap harinya orang yang terinfeksi bertambah 14.000, separuh dari jumlah ini adalah pemuda berusia antara 15 – 24 tahun [<http://www.depkes.go.id>. Akses 24 April 2019]

Menurut Pusat Penelitian Harvard, 65% adalah remaja dan dewasa muda [usia 13-25 tahun]. Kelompok usia ini tingkat promiskuitasnya atau

hubungan seksual antara sejumlah pria dan wanita tanpa ada aturan yang mengikat, sangat tinggi di negara-negara yang menganut asas kebebasan seks [*free sex*], di mana nilai moral etik dan agama diabaikan [<http://www.depkes.go.id>. Akses 24 April 2019].

Sebagaimana diketahui kelompok risiko tinggi [*high risk*] terkena penularan virud AIDS pada mulanya adalah kelompok homeseksual. Praktek ini yang telah dilegalisasikan di sejumlah negara, bahkan dapat menjadi pemicu peningkatan kuantitas 50 penyebaran yang lebih dahsyat lagi. Dewasa ini kelompok heteroseksual pun menempati risiko tingi, yaitu bagi mereka yang terlibat prostitusi, dan gonta-ganti pasangan [*promiskuitas*]. Di USA 56%-75% disebutkan penularan AIDS melalui homoseksual dan 26%-30% melalui heteroseksual. Namun informasi terakhir keadaan menjadi terbalik, kini 86% penularan virus mematikan tersebut melalui heteroseksual, sisanya di samping melalui homoseksual, juga melalui transfusi darah dan penggunaan jarum suntik pada pecandu narkotika [<http://www.depkes.go.id>. Akses 24 April 2019]

Pola dan gaya hidup di belahan dunia yang

menganut seks bebas, kelompok remajalah yang paling riskan, di mana 7 dari 10 wanita dan 8 dari 10 pria telah melakukan hubungan intim sebelum berumur 20 tahun. Satu dari 6 remaja putri yang aktif bergaul bebas [*sexually active*], paling sedikit telah berganti-ganti pasangan dengan 4 pria berbeda.

Ada banyak alasan mengapa perhatian dunia tersedot begitu besar untuk memerangi HIV/AIDS. Epideminya telah menyebar dengan sangat cepat. Penyakit yang 20 tahun yang lalu belum dikenal sama sekali, saat ini HIV/AIDS telah menginfeksi sekitar 60.000.000.- di dunia, dan lebih dari 21 juta meninggal.

Setiap harinya di dunia orang terinfeksi HIV/AIDS mencapai 14.000 orang. Lebih dari 95% terdapat di negara-negara berkembang. Menjadi penyebab kematian terbesar keempat pada orang dewasa dan harapan usia hidup menurun 10 tahun. Terjadinya peningkatan jumlah yatim piatu 13.2 juta anak yatim piatu, 12.1% di Afrika. Apabila tidak diatasi meniadakan kemajuan pembangunan yang telah dicapai selama 50 tahun terakhir [<http://www.depkes.go.id>. Akses 24 April 2019].

Estimasi nasional 2002: 90.000 sampai 130.000

sudah mengidap HIV, angka tersebut diyakini masih terlalu rendah dari kenyataan sebenarnya. Enam provinsi menjadi prioritas perhatian: DKI, Desember 2015 Jawa Barat [telah mencapai 20.296 kasus HIV dan 6.222 kasus AIDS. Bali Desember 2015 jumlah kasus HIV sebesar 191.073 orang dan kasus AIDS sebesar 77.112 orang [<https://www.pikiran-rakyat.com>, akses 24 April 2019]. Secara nasional 12-19 juta orang rawan tertular HIV, karena perilakunya dan perilaku pasangannya. 50% dari 124.000-169.000 penyalahgunaan narkoba suntik sudah terinfeksi HIV.

Ada setengah juta pekerja seks komersial [PSK], dengan 5-8 juta pelanggan. Situasi akhir-akhir ini, semua provinsi telah melaporkan adanya penderita HIV termasuk Aceh. Meskipun belum begitu banyak, dengan kondisi Aceh yang open area, terutama kondisi pasca tsunami, banyak pendatang dari luar, mobilitas penduduk yang tinggi dan adanya pengungsian, memperbesar risiko penularan penyakit termasuk HIV/AIDS.

Di Aceh, kelompok yang mungkin mengalami peningkatan kerentanan infeksi adalah perempuan, terutama yang kehilangan keluarga dan tidak aman

secara ekonomi, dan anak-anak, terutama yang menjadi yatim piatu dan tidak memiliki keluarga, serta pekerja kemanusiaan dengan lingkungan kerja berisiko, seperti tenaga medis dan relawan.

Untuk kasus Aceh, akibat lemahnya otoritas kesehatan lokal untuk melakukan antisipasi dan sosialisasi bahaya AIDS dan kurangnya pendataan yang konsisten mengenai kasus-kasus yang terkait HIV/AIDS, juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan kasus-kasus HIV/AIDS di Aceh.

❖ Perspektif Agama dalam Memerangi AIDS/ HIV

Tabiat seksual bentuk alamiah yang mendasar bagi setiap makhluk. Sejak awal makhluk seperti manusia diberikan hasrat [birahi] terhadap lawan jenis. Kaum laki-laki tampaknya diciptakan sek lebih agresif [aktif] ketimbang perempuan. Meskipun demikian, era informasi bebas seperti saat ini terkadang hasrat sek perempuan lebih aktif [agresif] ketimbang laki-laki.

Hakikatnya agama diturunkan untuk membim-

bing hidup manusia supaya berjalan sesuai dengan fitrah. Ketika manusia tidak lagi berjalan dengan fitrahnya yang digariskan artinya ia telah keluar dari garis-garis yang ditetapkan. Awal dari inilah manusia dianggap rusak moralnya. Dari itu Allah SWT. mengutus para Nabi dan Rasul-Nya untuk memberi peringatan kepada umat manusia supaya kembali ke fitrahnya. Peringatan itu dilakukan oleh para rasul secara turun temurun hingga masa Nabi Muhammad SAW. Setiap muncul penyimpangan selalu diturunkan sarana *nubuwat* untuk meluruskannya, termasuk di dalamnya mengabaikan larangan agama seperti penyimpangan seksual.

Suatu ketika budaya seksual masyarakat berada pada titik yang paling kritis, instrumen birahi yang seharusnya bisa dinikmati secara fitrah dan dijadikan sarana untuk kelanjutan keturunan, telah keluar dari koridor moral yang membingkainya. Ketika itu orientasi birahi telah membabi buta, kenikmatan diraih dengan menghalalkan semua cara, termasuk dengan cara *hayawaniyah*. Tentu semua perilaku tersebut membuahakan malapetaka dan bencana kepada manusia. Allah SWT. dalam surah 'Abasa, ayat 11 menerangkan:

ج
كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ

Artinya: "Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan"[QS. 'Abasa (80): 11]

Di jaman modern, salah praktek penyimpangan pengelolaan instrumen birahi adalah pergaulan bebas, praktek prostitusi, perilaku homoseksual, lesbian, telah membuang batas-batas malu, bahkan telah melahirkan masyarakat yang berbudaya mesum dan menjadikan kemesuman sebagai kebanggaan sosial. Allah SWT. berfirman dalam surah al-Isra':

ط
وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk"[QS. Al-Isra' (17): 32]

Permasalahan utama penyakit AIDS adalah terletak pada faktor psikologik dan psikosial. Selain faktor pada diri individu sendiri, faktor budaya [pergaulan bebas] dan lemahnya moral, etik dan

agama merupakan faktor eksternal yang menentukan pula. Allah SWT. berfirman:

وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نَقِيضٌ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ
قَرِينٌ

Artinya:” Barangsiapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan Yang Maha Pemurah, kami adakan baginya Setan (yang menyesatkan), maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya”[QS. Az-Zukhruf (43): 36]

❁ **Upaya Antisipatif dan Penanggulangan**

Ditinjau dari sudut psikologik/psikiatrik penyakit AIDS/HIV dapat menimbulkan empat permasalahan dalam kesehatan mental [jiwa]. *Pertama*, rasa takut (*fear*). Banyak orang sangat kuatir apakah ia terinfeksi atau tidak. Banyak yang terinfeksi namun tidak nampak secara klinis tetapi fatal. *Kedua*, rasa jijik [*contempt*]. Penderita mengalami diskriminasi dalam hal mendapatkan perhatian dan pelayanan kesehatan. *Ketiga*, rasa duka cita [*grief*]. Bagi penderita dan orang tua merasa kepedihan yang mendalam, terlebih tatkala jelang kematian si korban.

Keempat, rasa putus asa [*burn out*]. Rasa putus asa ini tidak hanya dialami si penderita, tetapi keluarga dan petugas medis yang merawatnya. Tidak terhitung jumlahnya bagi penderita AIDS/HIV ini ingin bunuh diri dan banyak juga petugas medis yang tidak tega melakukan tindakan *euthanasia*.

Dalam kaitan di atas, upaya penanggulangan penyakit ini dapat ditempuh dalam dua pendekatan, yaitu psikologis dan agama sebagaimana diterangkan berikut:

Religion. Memperkuat diri dengan benteng agama yang kokoh, sehingga tak mudah terperosok ke dalam seks bebas;

Knowledge. Sosialisasi dan memberikan pengetahuan tentang seluk beluk penyakit AIDS dan cara penularannya, bahaya serta pencegahan, melalui pendidikan masyarakat dengan jalan penyebaran artikel pamflet, brosur, serta mass media lainnya;

Belief. Menanamkan keyakinan melalui berbagai pendekatan pendidikan tentang bahaya AIDS; dan

Confiction. Menimbulkan kesadaran dan motivasi untuk mengubah perilaku seksual mastery. Menguasai berbagai keterampilan untuk mengubah

pola hidup perilaku seksual ke arah yang sehat dan bertanggung jawab.

Membekali generasi muda melalui pendidikan agama sampai fase *murahiqah al-mutaakhhirah*, yaitu remaja akhir, berusia 12-18 tahun. Fase ini dikenal juga dengan pubertas, masa aqil baligh atau pancaroba. Pada fase ini, seorang anak remaja mulai berkembang kemampuan berfikir abstrak, berfikir logis dan kritis, kehidupan batinnya bersifat rasional. Timbulnya gejala *sturm und drang*, yaitu semangat yang meluap-luap panas membara seakan ingin merombak dunia. Karena itu pendidikan agama yang diberikan harus dengan pendekatan persuasif, objektif dan rasional.

Banyak remaja yang sudut jiwanya kosong, disebabkan kurang kasih sayang, perhatian dan pendidikan agama di rumah tangga akan diisi oleh “idola gaulnya yang terkadang merusak perkembangan jiwanya”. Anak-anak mencari sosok idolanya di luar sebagai kompensasi jiwanya.

Diperlukan wadah-wadah kegiatan sosial keagamaan yang terpimpin dan terkendali, sehingga tidak masuk wadah genk dan preman remaja yang kebut-kebutan dan bahkan tidak jarang mudah

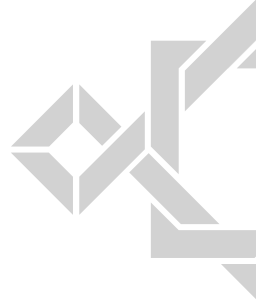
terpengaruh dengan narkoba. Usia ini sangat rentan untuk terpengaruh kepada penyalahgunaan zat terlarang tersebut. Penelitian menunjukkan, 97% penyalahgunaan zat tersebut adalah anak usia ini. Remaja dengan kondisi keluarga tidak baik mempunyai risiko 7.9 kali untuk menyalahgunakan narkoba.

Remaja dengan depresi mempunyai risiko 18.8 kali untuk menyalahgunakan narkoba. Komitmen agama dan ketaatan menjalankan ibadah menjadi benteng utama yang dapat membendung anak menjadi pemakai narkoba. Karena itu diperlukan pengawasan orang tua yang ketat terhadap anak dalam hal ibadah dan teman pergaulannya.

Keterangan di atas merupakan penjelasan tentang bahaya AIDS/HIV bagi kehidupan manusia, agama dan sosial masyarakat. Penyakit ini lahir akibat ulah manusia yang tidak wajar sehingga dikelompokkan ke dalam penyakit sosial. Karena itu Alquran senantiasa memperingatkan generasi supaya menjauhi dari penyakit yang sangat mudah mewabah ini. Kaum Luth di negeri Madyan menjadi contoh beharga bagi generasi setelah al-Quran diturunkan. Akibat dari perbuatan itu, satu generasi dari kaum ini murka dan

ditelan tanah.

Pada prinsipnya, pendidikan tentang bahaya AIDS/HIV seperti diterangkan di atas telah terjadi dalam budaya Aceh sejak zaman lampau. Orang tua di Aceh memiliki banyak kisah teladan yang mereka sarikan dari pesan-pesan Alquran. Salah satu kisah tersebut tentang kaum Nabi Luth as. yang musnahkan Tuhan karena perilaku suka [kawin] sesama jenis. Kisah ini biasanya disampaikan oleh orang tua Aceh jelang tidur kepada anak atau cucunya. Kisah-kisah seperti ini juga pernah diceritakan sesama pemuda generasi *meunasah* atau semasa mereka belajar di *balee semeubeut*. Baik kisah teladan yang disampaikan dalam sebuah keluarga maupun yang dikisahkan di *meunasah-meunasah* atau di *balee-balee semeubeut* kiranya menjadi salah sarana pendidikan dalam membendung gejala AIDS/HIV yang semakin mewabah dalam generasi bangsa.[]



GENDER DAN PENDIDIKAN KELUARGA DI ACEH



❁ **Bagian Awal**

Masyarakat Yunani terkenal memiliki pemikiran berlian dalam berfilosofis, namun mereka tidak banyak berbicara tentang hak dan kewajiban perempuan. Zaman ini wanita tidak berhak memiliki apa pun. Pendidikan hanya untuk anak laki-laki. Wanita tidak berhak belajar membaca atau menulis. Wanita dari kalangan elite diperlakukan seperti tahanan. Selalu diawasi oleh penjaga, tidak boleh

ke tempat hiburan, dikunci di dalam rumah apabila suaminya pergi. Di kalangan bawah wanita sangat menyedihkan. Mereka diperjual-belikan, mereka tidak memiliki hak-hak sipil, bahkan hak warispun tidak ada. Wanita yang berumah tangga berada di bawah suaminya [<https://medium.com>, akses 22 April 2019].

Dalam peradaban Romawi perempuan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya. Setelah kawin pindah ke tangan sang suami. Kekuasaan tersebut mencakup kewenangan menjual, mengusir, menganiaya dan membunuh. Hal ini berlangsung hingga abad ke 6 M. [<https://medium.com>, akses 22 April 2019]

Dalam masyarakat Hindu dan Cina lebih tragis lagi, hak hidup seorang perempuan yang bersuami harus berakhir pada saat kematian suaminya; istri harus dibakar hidup-hidup pada saat suaminya dibakar [digilib.uinsby.ac.id, akses 22 April 2019]

Hal ini baru berakhir pada abad ke-17. Perempuan pada masyarakat Hindu ketika itu bahkan ada yang dijadikan sesajen bagi Dewa. Petuah sejarah kuno mereka mengatakan bahwa: “Racun ular dan api tidak lebih jahat dari perempuan”. Sementara itu

dalam pepatah Cina Kuno diajarkan: Anda boleh mendengar pembicaraan wanita, tetapi jangan sekali-kali mempercayai kebenarannya.” [digilib.uinsby.ac.id, akses 22 April 2019]

Dalam ajaran Yahudi martabat wanita sama dengan pembantu. Ayah berhak menjual anak perempuan kalau ia tidak mempunyai saudara laki-laki. Ajaran mereka menganggap wanita sebagai sumber laknat karena dialah yang menyebabkan Adam terusir dari surga. Sepanjang abad pertengahan, nasib wanita sangat memprihatinkan, bahkan tahun 1805 wanita Inggris belum lagi memiliki hak pemilikan atas harta benda secara penuh dan hak menuntut ke pengadilan [digilib.uinsby.ac.id, akses 22 April 2019].

Ketika Elizabeth Blackwill, dokter pertama di dunia menyelesaikan studi di Geneve University pada tahun 1849, teman-temannya yang bertempat tinggal dengannya memboikotnya dengan dalih bahwa wanita tidak wajar memperoleh pelajaran. Bahkan ketika sebagian dokter bermaksud mendirikan institut Kedokteran untuk wanita di Philadelphia, Amerika Serikat, ikatan dokter setempat mengancam untuk memboikot semua dokter yang bersedia mengajar di sana [Shihab, 1996: 296-298].

Lebih detail lagi bahkan peristiwa-peristiwa natural pada wanita seperti haid sering dianggap sebagai hal memalukan. Sudah berabad-abad sifat mistik darah haid dikenai peringatan hukuman. Haid wanita dipercayai dapat mengakibatkan kerusakan pada panen tembakau di Papua Nugini; matinya ikan pada salah satu pulau Selat Tones; gagalnya panen padi di Sumatera, dan matinya ternak di beberapa daerah Afrika.

Dalam adat Maori, misalnya wanita tidak tepat menyiapkan oven ataupun memasak makanan tertentu di saat ia mendapat haid. Jika ia mencoba mengumpulkan kerang di saat haid, kerang-kerang itu akan berpindah ke bagian pesisir yang lain. Wanita dilarang bekerja di kilang gula milik orang Perancis karena kehadirannya dapat menyebabkan gula berubah hitam. Kaum hawa diasingkan dari pertambangan perak di Meksiko karena dapat menyebabkan bijih perak menghilang. Dan jika ia bekerja pada industri ganja di Indocina, maka mimpi indah para pengisap ganja akan berubah menjadi mimpi buruk karena kehadirannya dapat mengubah ganja menjadi pahit. Bahkan bir masam sering dikatakan akibat haid wanita [<http://mulpix.com>, akase 23 April 2019]

Dari berbagai telaah historis menggambarkan marginalisasi wanita bahkan ketertindasan yang berkepanjangan. Kita pun tahu seluruh elemen kebudayaan, nampak jelas memiliki watak memihak pada, atau didominasi oleh, kaum laki-laki. Dengan ringkas bisa dikatakan bahwa dalam kebudayaan perempuan belum merdeka. Secara simbolis maupun secara actual berlangsung proses marginalisasi atas kaum perempuan. Hal ini terbukti dalam realita ketika jerih payah, jasa dan kemampuan perempuan tidak dihargai sama tinggi dengan prestasi dan kemampuan laki-laki [<http://mulpix.com>, akase 23 April 2019].

Persepsi masyarakat tentang eksistensi perempuan, memperlihatkan kedudukan kaum perempuan dalam posisi inferior. Fakta di masyarakat menunjukkan keberadaan perempuan masih belum ditempatkan sebagai mitra setara. Fakta ini menjadi isu gender yang masih menggejala di masyarakat.

Gender adalah konsep yang mengacu kepada pemilahan peran dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki. Isu gender ini telah menjadi bagian integral dan strategis dari isu-isu pembangunan yang masih terus dan tetap diungkapkan dalam berbagai

forum, baik nasional maupun internasional. Isu ini semakin mencuat dalam berbagai wacana dan kajian, sehingga mendorong adanya suatu cara pandang yang lebih terarah.

Posisi dan kedudukan perempuan di dalam masyarakat diharapkan semakin kuat dengan dikeluarkannya berbagai regulasi yang mengatur penempatan perempuan sejajar dengan kaum laki-laki, antara lain UU No. 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Dengan berbagai regulasi tersebut perempuan diharapkan mempunyai hak, kesempatan dan kewajiban yang sama dalam pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan selama ini boleh dikatakan telah menunjukkan kemajuan di segala bidang, dirasakan masih mengandung kesenjangan dalam hal kemitraan sejawaran antara laki-laki perempuan. Ditinjau dari sisi pendidikan, kesenjangan tersebut terasa misalnya dengan melihat kondisi masih tingginya buta aksara perempuan jika dibandingkan dengan angka buta aksara laki-laki.

Dalam lingkup sekolah pun, bacaan sekolah masih memomorduakan perempuan. Selain itu semakin

tinggi jenjang pendidikan, maka semakin rendah partisipasi perempuan pada jenjang tersebut. Selanjutnya bidang-bidang studi teknologi masih didominasi oleh kaum laki-laki, sedangkan siswa perempuan cenderung memilih bidang studi kerumahtanggaan atau bidang studi yang sesuai dengan karakteristik keperempuanannya.

Oleh karena itu persepsi tentang perbedaan dalam kesempatan dan perlakuan yang ditekankan atas dasar jenis kelamin [*gender discrimination*] yang mengakibatkan kerugian pada perempuan baik dalam kedudukan maupun perannya sebagai mitra sejajar laki-laki perlu dihilangkan.

Sejak dini usia dan usia pendidikan dasar kepada anak perempuan harus diperkenalkan kesetaraan gender antara lain melalui pendidikan agar siswa perempuan di kemudian hari tidak tergiring untuk selalu menekuni bidang tradisional, sehingga kemampuan perempuan dan laki-laki dapat lebih berkembang antara lain pada peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat memiliki kesempatan berperan aktif di segala kegiatan pembangunan terutama dalam menghadapi perubahan yang sifat nasional dan internasional.

❁ Gender di Aceh

Dalam rangka mencapai kesetaraan dan kesejajaran gender dalam peningkatan konsep pendidikan untuk semua [*Education for all*], maka pendidikan yang berwawasan gender perlu ditingkatkan. Merujuk sejarah, Aceh salah satu wilayah di dunia sebagai pioneer pendidikan gender. Buktinya, tidak hanya mempertimbangkan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam urusan rumah tangga.

Tetapi lebih dari itu, masyarakat Aceh pernah mempercayakan seorang wanita menjadi panglima perang dan pada kesempatan lain Aceh pernah menobatkan wanita menjadi raja. Mulai dari Laksamana Keumalahayati [1550-1615], Sri Ratu Safiatuddin Tajul Alam [1641-1675], Sri Ratu Naqiatuddin Nurul Alam [1675-1678], Sri Ratu Zaqiatuddin Inayat Syah [1678-1688], Sri Ratu Zainatuddin Kamalat Syah [1688-1699] dan banyak lagi yang lain tidak dapat disebutkan di sini. Namun, semua itu dapat dijadikan 'cermin' bahwa Aceh sebagai salah satu wilayah pertama yang mampu membuktikan konsep kesetaraan gender secara sempurna.

❁ Pendidikan Keluarga

Kemajuan sains-teknologi yang pesat hari ini memberi manfaat yang luar biasa bagi umat manusia. Namun, di sisi lain apabila disalahgunakan teknologi dapat membawa malapetaka. Produk teknologi berdampak secara langsung atau tidak langsung bagi kultur generasi muda. Banyak informasi yang diperkenalkan melalui teknologi yang dapat diambil pelajaran berharga atau yang tidak. Semua informasi oleh setiap generasi sesuai dengan filter yang dimiliki. Sejatinya, generasi islami setiap informasi teknologi yang ditampilkan harus disaring dengan filter agamis. Hal ini sesuai dengan petunjuk Alquran terhadap orang beriman.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن
تَصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya

yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” [QS. Al-Hujurat (49): 6]

Bentuk informasi yang diakibatkan oleh teknologi seperti diterangkan merupakan bentuk imperialisme kultural, dan ini telah merambat ke dalam masyarakat Muslim yang tidak mungkin terbendung. Apabila informasi ini tidak disikapi secara positif oleh generasi muda Muslim maka dapat memengaruhi akhlak yang berefek pada pedangkalan akidah. Oleh karena itu, dalam upaya membentuk arus kemajuan teknologi-informasi, sebagai seorang generasi Muslim harus mencernanya melalui trilogy pembangunan, Iman, Islam dan Ihsan. Ketiga bentuk ini menjadi harapan dalam membentengi produk arus globalisasi dan kemajuan teknologi-informasi.[]

❁ Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak

Anak amanah Allah yang dititipkan. Mereka tumbuh dan kembang sesuai dengan harapan orang tuanya. Seorang anak bisa diciptakan kepribadian mulia. Bisa juga terbentuk kepribadian hina. Kedua bentuk ini dapat dibentuk dalam sebuah keluarga. Karena itu, hadits menerangkan bahwa seorang anak dalam sebuah keluarga dapat menjadi Islam atau non

Islam sangat tergantung kepada pendidikan keluarga.

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ
وَيُنَصِّرَانِهِ وَيَمَجِّسَانِهِ

Artinya: Tidaklah seorang bayi yang dilahirkan ke dunia ini) melainkan ia berada dalam kesucian [fitrah]. Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi...[HR. Muslim, No. 4803]

Hadits di atas menunjukkan bahwa baik buruknya seorang anak terletak keluarga. Selain keluarga faktor yang memengaruhi akhlak anak adalah aspek spiritual, faktor organo-biologik, psiko-edukatif dan sosial budaya. Salah satu jaminan tumbuh-kembang anak agar sehat fisik, mental, sosial dan religius dalam menghadapi era globalisasi, terwujudnya keluarga sakinah *mawaddah wa rahmah*.

Ketika seorang anak tumbuh dan kembang dalam kondisi tidak baik maka terjadi rawan moral dan sosial. Anak tumbuh kembang sebagai pribadi yang bertentangan dengan nilai-nilai sosial. Dari itu, tidak

heran ketika usia sekolah seorang anak melanggar sejumlah aturan sekolah. Misalnya, bolos sekolah, terlibat kenakalan, sering berbohong, melawan, tawuran dan lainnya.

Kondisi sekolah yang kurang baik juga berpotensi anak berperilaku kasar dan melawan. Demikian juga dengan lingkungan juga memberi pengaruh terhadap perilaku anak. Kondisi ini dalam istilah pendidikan dikenal dengan kerawanan lingkungan. Tempat-tempat hiburan dapat mengarah perilaku negatif, maraknya peredaran alkohol, narkotik dan zat adiktif lainnya, pengangguran, beredarnya bacaan, tontonan, majalah, TV yang sifatnya pornografis dan kekerasan, anak-anak putus sekolah yang berkeliaran di jalan, pencemaran lingkungan, tindak kekerasan, kriminalitas, dan kesenjangan sosial.

Pencemaran alam akibat industrialisasi, melunturkan nilai-nilai tradisi dan mendatangkan pendangkalan penghayatan agama, pola kejahatan yang makin canggih dan sadis, mewabahnya penyakit-penyakit yang sulit diatasi dan lain sebagainya. Seorang pakar logoterapis mengungkapkan salah satu prestasi penting dari proses modernisasi di dunia barat mampu melepaskan diri dari belenggu

tradisi yang menghambat kebahagiaan.

Efek dari perilaku yang meresahkan dalam kehidupan sosial dan agama seperti diterangkan bagian dari faktor yang menghambat kebahagiaan bahkan dapat mengundang murka. Alam kelihataan hari ini semakin tidak bersahabat, banjir dimana-mana, kemarau panjang, kelaparan, gempa bumi dan lainnya. Semua itu bagi orang Aceh dipahami efek dari dosa atau perilaku negatif manusia.

Berdasarkan pendidikan yang diperkenalkan di atas, Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa syari'at Islam adalah fondasi, kekuasaan adalah penyangga dan pendidikan adalah pilarnya. Jika fondasi lemah maka bangunan di atasnya rubuh; tidak ada penyangga maka bangunan itu hilang; jika tidak ada pilar, maka kelengkapan lain pun menjadi rontok. Karena itu fondasi harus dikuatkan, penyangga semakin memperkokoh perangkat dan instrumennya serta pendidikan sebagai pilarnya perlu diberdayakan.

Balee semeubeut, meunasah, masjid, rangkan dan *dayah* di Aceh merupakan sarana yang memperkuat nilai-nilai pendidikan berbasis syariat seperti dimaksud dalam pesan Imam Asy-Syafi'i. Melalui lembaga ini masyarakat Aceh lahir sebagai masyarakat

a learning Society yang berorientasi kepada nilai-nilai keacehan. Diperkirakan bentuk masyarakat Aceh seperti inilah dominan mengisi pembangunan dalam bidang pendidikan dan pemerintahan di Aceh hari ini.[]

DAFTAR PUSTAKA

1. Kitab/buku

Alquran dan Hadits

Abu Bakar, Alyasa'. (t.t.). Abu Bakar dan Wamad Abdullah, "Manuskrip Dayah Tanoh Abee, kajian keislaman di Aceh pada masa kesultanan," dalam *Kajian Islam*, No. 2. 35.

Ahmad, Kamaruzzaman Bustamam. (2003). "Membangun Kembali Jati Diri Ulama Aceh (Pengantar Penerjemah)," dalam M. Hasbi Amiruddin, *Ulama Dayah: Pengawal Agama Masyarakat Aceh*. Lhokseumawe: Nadiya Foundation.

Al-Attas, Syed M. Naquib. (1990). *Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu*. Bandung: Mizan.

Al-Sayuthi. (t.t.). *al-Asybah wa al-Nadhayir fi Furu'*. Haramain: tp.

Amin, Samsul Munir. (2009). *Ilmu Dakwah*. Jakarta: Amzah.

Amiruddin, M. Hasbi .(2002). "Ulama Dayah: Peran dan Responnya terhadap Pembaruan Hukum Islam," dalam Dody S.Truna dan Ismatu Ropi

- (ed.), *Pranata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Amiruddin, M. Hasbi. (2003). *Ulama Dayah, Pengawal Agama Masyarakat Aceh*. Lhokseumawe: Nadiya Foundation.
- Aslam Nur. (1996). *Ramadhan dalam Persepsi Masyarakat Aceh, sebuah Interpretasi Antropologi*. Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Kepurbakalaan Aceh.
- Azra, Azyumardi. (2001). *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, cet. 3. Jakarta: Kalimah.
- Baihaqin A.K. (1993). "Ulama dan Madrasah di Aceh." dalam Taufik Abdullah (ed.), *Agama dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Rajawali.
- Daulay, Haidar Putra. (2001). *Historisitas dan Eksistensi: Pesantren dan Madrasah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- (2004). *Dinamika Pendidikan Islam*. Bandung: Citapustaka Media.
- Dhofier, Zamakhsyari. (1995). *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES.
- 1985. *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES.
- Hasbullah. (1999). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan*

- Perkembangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasjmy, A. (1993). *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesi*; Kumpulan Pra Saran pada Seminar 17-20 Maret 1963 di Aceh. Bandung: Al-Ma'arif.
- (1980). *Banda Aceh Darussalam Pusat Kegiatan Ilmu dan Kebudayaan*, dalam: Ismail Suny, *Bunga Rampai Tentang Aceh* (Jakarta: Bharatara Karya Aksara).
- Ibrahim, Muhsinah (2014). *Dayah, Masjid, Meunasah Sebagai Lembaga Pendidikan Dan Lembaga Dakwah Di Aceh*, Jurnal Al-Bayan / VOL. 21, No. 30, Juli - Desember.
- Idris, Safwan. (1995). *Perkembangan pendidikan Pesantren/Dayah, antara Tradisi dan Pembaharuan, dalam Perkembangan Pendidikan di Daerah Istimewa Aceh*. Banda Aceh: Majelis Pendidikan Daerah Istimewa Aceh.
- Ismail, Badruzzaman. (2002). *Masjid dan Adat Meunasah sebagai Sumber Energi Budaya Aceh*. Banda Aceh: Majelis Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Ismuha. (1998). *Sejarah Perkembangan Pendidikan Agama Di Aceh*. Majelis Ulama Daerah Istimewa Aceh dalam Tesis Teuku Zulkhairi Inovasi Kurikulum Pendidikan Dayah.
- (1996). "Ulama Aceh dalam Perspektif Sejarah." Dalam Taufik Abdullah (ed.), *Agama dan Perubahan*

- Sosial*. Jakarta: Raja grafindo Persada.
- Kurdi, Muliadi. (2017). *Filosofi Peusijek dalam Masyarakat Aceh*. Banda Aceh: Naskah Aceh.
- (ed.) (2019). *Diwan Imam Asy-Syafi'i*, edisi bahasa Indonesia, Dr. Nucholish Sofyan, MA & Musfirah, Lc., Mus (pent.). Banda Aceh: Naskah Aceh.
- Mannan, Abdul (2007). *Teungku Inong*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh.
- Mastuhu. (1994). *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: INIS.
- Qurnati, Tri. (2007). *Budaya Belajar dan Ketrampilan Berbahasa Arab di Dayah Aceh Besar*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Reid, Anthony Reid. (1997). *The Blood of The People: Revolution and The End of Tradisional Rule in Northern Sumatera*. Kuala Lumpur: tp.
- Siegal, James T. (19969). *The Rope of God*. Berkeley: 1969.
- Sufi, Rusdi. (1987). *Pandangan dan Sikap Ulama di Daerah Istimewa Aceh*. Jakarta: LIPI, 1987.
- Sunanto, Musyrifah. (2005). *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunni, Ismail. (1980). *Bunga Rampai Tentang Aceh*. Jakarta: Batara Karya Aksara.
- Tim Peneliti Syiar Islam. (2012). *Syiar Islam di Aceh*,

Dinas Syariat Islam Aceh, 109-110.

Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah. (1992). *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

2. Jurnal

Abdul Hadi. (t.t.). *Dinamika Sistem Institusi Pendidikan di Aceh*, Jurnal Ilmiah Peuradeun International Multidisciplinary Journal Artc. OAJI ID: 745-1412779528, 185.

Hamdan. (2009). *Dayah Dalam Perspektif Perubahan Sosial*, Jurnal Al-Hikmah, Vol. IX, No. 14 Jan s/d Juni.

Ibrahim, Muhsinah. (2014). *Dayah, Mesjid, Meunasah Sebagai Lembaga Pendidikan dan Lembaga Dakwah di Aceh*, Jurnal Al-Bayan / VOL. 21, No. 30, Juli – Desember, 25.

Muntasir. (t.t.). “Dayah Dan Ulama Dalam Masyarakat Aceh,” dalam Sarwah, vol II, 43.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, BAB I (Ketentuan Umum), Pasal 1, Ayat 1.

Zukhdi, Muhammad. (2017) *Dinamika Perbedaan Madzhab Dalam Islam (Studi terhadap Pengamalan Madzhab di Aceh)*, Jurnal Ilmiah Islam Futura. Vol. 17. No. 1, Agustus, 121-149.

3. Internet

Amiruddin, M. Hasbi. (2018). *Intan Beut Anak Aceh*,
<http://aceh.tribunnews.com>.
digilib.uinsby.ac.id, akses 22 April 2019
<http://mulpix.com>, akase 23 April 2019
<http://www.depkes.go.id>. akses 24 April 2019
<https://medium.com>, akses 22 April 2019
<https://www.alodokter.com>, akses 22 April 2019
<https://www.maxmanroe.com>, akses 20 Mei 2019
<https://www.pikiran-rakyat.com>, akses 24 April
2019
<https://www.syahida.com>, akses 23 April 2019

INDEKS

A

ACEH i, 1, 31, 79, 151
Aceh Darussalam 7, 35, 40, 95,
105, 167
akhlak 2, 26, 36, 43, 58, 60,
62, 68, 106, 107, 108,
109, 110, 112, 113, 160,
161
Al-Attas 26, 165
Al-Kahar 7
al-Qadiriyyah 25
Alquran Rayeuk 42
Alquran Ubiet 42
as-Singkily 25
Asy-Syafi'i 34, 35

B

balee 20, 40, 44, 60, 61, 80,
84, 149
Bidayah 42
budaya 5, 15, 31, 40, 58, 59,
60, 68, 70, 89, 109, 116,
117, 118, 119, 120, 121,
122, 135, 136, 143, 144,
149, 161
Bungòn jaròe 33

C

Cot Kala 20, 39

D

dayah 2, 3, 8, 12, 13, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 35,
36, 39, 40, 45, 47, 48,
54, 55, 59, 60, 61, 63,
73, 80, 84, 163
duek pakat 15

F

filsafat 26
fiqh 23, 26, 60

G

gampong 15, 16, 17, 61, 62
guru iii, 18, 24, 29, 30, 37, 45,
50, 54, 55, 73, 81, 82,
89, 90, 109, 110, 122,
123, 124, 125, 126, 127,
128, 129

H

hadits 26, 56, 83, 160

halaqah 45, 54, 55
Hasjmi 14, 15, 20, 25
Hasjmy 13, 15, 16, 20, 167

K

Kerajaan Daya 7
keuchik 15
Ki Hajar 18
kitab Arab 2, 44, 46
kitab jawoe 23
kitab kuning 23, 27, 38, 44,
46, 54
Kitab Lapan 42

L

learning society 61, 89
logika 6, 26

M

Masailal Muhtadi 42
Melayu 2, 7, 26, 38, 42, 44, 54,
68, 165
mesifeut 60
mesjid 12, 15, 24, 37, 38, 39,
44, 46, 48, 54, 55
meudagang 21, 22, 24, 63, 64,
67, 68
Meudrah 21
meunasah 2, 3, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 24, 35, 36,
37, 40, 43, 44, 46, 48,
54, 55, 59, 60, 61, 62,
63, 80, 84, 149, 163
meurukun 60, 62
MPD 79, 80, 81, 83, 84, 85,
88, 89, 90, 91, 93, 94,

95, 96, 97, 99, 100, 103
mukim 4, 21, 37

N

Nusantara 5, 10, 15, 20, 24,
26, 39, 62, 68

P

panyot 60
Pase 5, 7
Perlak 5, 6, 7, 19, 20
peutua gampong 15

Q

Qanun 31, 37, 69, 70, 73, 74,
75, 86, 94, 96, 104, 105,
110, 169

R

ranggang 13, 18, 20, 21, 35,
37, 38, 40, 44, 48, 61

S

Samudera 5, 7
seumeubeut 1, 2, 16, 18, 20,
24, 32, 33, 37, 38, 39,
40, 41, 43, 44, 45, 46,
47, 50, 51, 53, 54, 55,
56, 58, 60, 61, 80, 83,
84, 149, 163
Snouck 11
Sultan Iskandar Muda 8
Sultan Salahuddin 7
Sumatera 5, 9, 22, 154, 168

T

tafsir 26, 49
takzhim 45
tarekh 60
tasawuf 13, 23, 26, 38, 43, 44,
46, 54
teungku 1, 14, 20, 21, 24, 29,
32, 33, 34, 38, 39, 41,
42, 43, 51, 53, 54, 56,
58, 84
teungku chik 24
Tgk. Abdul Wahab Tanoh Abee
27
Tgk. Chik di Tiro 27
Tgk. Chik Kuta Karang 27
Tgk. Muhammad Saman 27
tuha lapan 15
tuha peut 1, 15

U

Ulama 5, 9, 12, 13, 27, 69, 85,
165, 166, 167, 168, 169
uleebalang 27

Z

zawiyah 12, 13

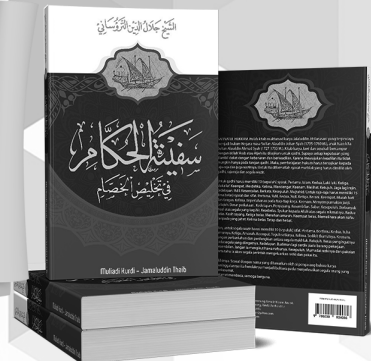
PERCETAKAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY



Menerima desain dan cetak buku, laporan, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, brosur, poster, ID card, jilid lem panas, jilid spiral, spanduk, stiker, dll.



“Percetakan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry hadir sebagai bentuk penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi; menghasilkan berbagai karya ilmiah kualitas dunia, membangun peradaban akademik berorientasi ilmu-ilmu keislaman, sains, teknologi dan seni secara profesional.”



facebook.com/arranirypress



0853-9429-7008



instagram.com/arranirypress



percetakan@ar-raniry.ac.id